

**STRATEGI DAN RENCANA AKSI
KONSERVASI ORANGUTAN INDONESIA
2007- 2017**



**Departemen Kehutanan
2007**

Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017

TIM PENYUSUN

Tonny Soehartono (Ditjen PHKA Departemen Kehutanan)
Herry Djoko Susilo (Ditjen PHKA Departemen Kehutanan)
Noviar Andayani (Asosiasi Pemerhati dan Ahli Primata Indonesia – Universitas Indonesia-Wildlife Conservation Society)
Sri Suci Utami Atmoko (Asosiasi Pemerhati dan Ahli Primata Indonesia - Universitas Nasional)
Jamartin Sihite (Orangutan Conservation Services Program)
Chairul Saleh (Yayasan World Wide Fund for Nature Indonesia)
Arifien Sutrisno (Orangutan Conservation Services Program)

KONTRIBUTOR

Adi Susmianto (SekDitJen PHKA Departemen Kehutanan)
Aldrianto Priadjati (BOSF); Darmawan Liswanto (Yayasan Titian/ FFI – IP);
Darrell Kitchener (Orangutan Conservation Services Program); Erik Meijaard (Orangutan Conservation Services Program);
Ian Singleton (SOCP/ Pan-Eco); Jatna Supriyatna (Conservation International);
Jito Sugarjito (Flora Fauna International – Indonesia Program)
Joko Pamungkas (PSSP-IPB); Peter Pratje (FZS/SOCP); Serge Wich (Great Ape Trust of Iowa)
Sofian Iskandar (Litbanghut Departemen Kehutanan); Togu Simorangkir (Yayorin)



**DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
DEPARTEMEN KEHUTANAN
2007**

Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017

Diterbitkan Tahun 2007 oleh :
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Departemen Kehutanan Republik Indonesia

Kontributor Foto dan Peta

- BOSF
- WWF Indonesia
- Serge Wich dkk
- Martin Hardiyono

Dicetak atas bantuan
USAID - OCSP

Disain Sampul oleh :
Herry Djoko Susilo

Foto Sampul oleh :
Tri Wahyu Susanto

ISBN :



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 53 / Menhut-IV / 2007**

T e n t a n g

**STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI ORANGUTAN INDONESIA
2007 – 2017**

MENTERI KEHUTANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha pelestarian orangutan di habitatnya diperlukan strategi dan rencana aksi konservasi sebagai kerangka kerja yang memerlukan penanganan prioritas, terpadu, dan melibatkan semua pihak dan para pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan usaha pelestarian orangutan sebagaimana huruf a diperlukan adanya strategi dan rencana aksi konservasi orangutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia Tahun 2007 – 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Keputusan Menteri

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia tahun 2007 – 2017 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- KEDUA** : Strategi sebagaimana dimaksud pada amar KESATU merupakan Kerangka Kerja terhadap berbagai program dan kegiatan konservasi orangutan dan wajib dijadikan sebagai pegangan/pedoman dalam melakukan konservasi orangutan;
- KETIGA** : Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan 2007 – 2017 di dalamnya memuat Strategi dan Rencana Aksi yang akan dievaluasi dan diperbaharui setiap 5 (lima) tahun;
- KEEMPAT** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 3 Desember 2007

MENTERI KEHUTANAN

H.M.S. KABAN



Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
4. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan
5. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan;
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Alam-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PHKA seluruh Indonesia.



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Orangutan sumatera dan orangutan kalimantan adalah dua jenis satwa primata yang menjadi bagian penting dari kekayaan keanekaragaman hayati kita, dan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, sementara tiga kerabatnya yaitu gorila, chimpanze, dan bonobo hidup di benua Afrika.

Orangutan dianggap sebagai suatu *'flagship species'* yang menjadi suatu simbol untuk meningkatkan kesadaran konservasi serta menggalang partisipasi semua pihak dalam aksi konservasi. Kelestarian orangutan juga menjamin kelestarian hutan yang menjadi habitatnya dan kelestarian makhluk hidup lainnya. Dari sisi ilmu pengetahuan, orangutan juga sangat menarik, karena mereka menghadirkan suatu cabang dari evolusi kera besar yang berbeda dengan garis turunan kera besar Afrika. Sebagai satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, orangutan dinilai memiliki potensi besar menjadi ikon pariwisata untuk wilayah ini.

Dalam peraturan perundangan Indonesia, orangutan termasuk dalam status jenis satwa yang dilindungi. Pada *IUCN Red List* Edisi tahun 2002 orangutan sumatera dikategorikan *Critically Endangered*, artinya sudah sangat terancam kepunahan, sedangkan orangutan kalimantan dikategorikan *Endangered* atau langka.

Diketahui bahwa jumlah populasi orangutan liar telah menurun secara terus menerus dalam beberapa dekade terakhir akibat hilangnya hutan dataran rendah, namun pada beberapa tahun terakhir ini kecepatan penurunan populasi orangutan terus meningkat. Prediksi para ahli, jika kondisi ini tidak membaik, maka dalam 10 tahun terakhir kita akan kehilangan hampir 50% dari jumlah populasi yang ada saat ini.

Konflik antara manusia dan orangutan sangat sering terjadi, kadangkala menimbulkan kerugian di pihak manusia namun yang paling sering terjadi adalah berakibat fatal pada pihak orangutan. Oleh karena itu, upaya konservasi orangutan dan habitatnya harus dilakukan tidak hanya oleh orang-orang yang bekerja dalam dunia konservasi saja, akan tetapi harus dilakukan dan didukung oleh pihak lainnya.

Saya berharap bahwa dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017 ini dapat menjadi panduan dalam penyelamatan orangutan sumatera dan orangutan kalimantan. Selain itu juga menjadi acuan bagi para pihak yang bekerja untuk konservasi orangutan di Pulau Sumatera maupun P. Kalimantan. Khususnya dalam penyusunan rencana tata ruang sangatlah penting untuk memperhatikan dokumen ini agar pembangunan di tingkat daerah dapat selaras dengan upaya pelestarian orangutan. Konversi hutan alam yang merupakan habitat penting bagi orangutan harus dihentikan dan perlu segera dilakukan perbaikan habitat di wilayah yang sudah terdegradasi. Orangutan di pusat rehabilitasi yang telah siap dilepasliarkan harus segera dicarikan areal pelepasliarannya. Kegiatan rehabilitasi dan reintroduksi orangutan harus dapat diselesaikan pada tahun 2015. Upaya perlindungan dan pengamanan harus dititikberatkan pada upaya pencegahan keluarnya orangutan dari habitat alaminya akibat kegiatan ilegal, dan bukan pada upaya penegakan hukum ketika orangutan sudah berada di luar habitat alaminya.

Oleh karena itu kepada semua pihak yang terlibat, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, pihak swasta di tingkat nasional dan daerah, serta masyarakat luas harus benar-benar dapat melaksanakan komitmen penyelamatan orangutan sumatera dan orangutan kalimantan yang tertuang dalam dokumen ini.

Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara aktif dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017 ini bermanfaat bagi semua pihak, dan mendukung kelestarian satwa yang juga adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

MENTERI KEHUTANAN

H. H. S. KABAN





DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto – Jakarta 1-270
Telepon : (021) 5734818 – (021) 5730316, Faximile : (021) 5734818 – (021) 5733437 Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon (0251) 311615 - Bogor

UCAPAN TERIMA KASIH

Orangutan sumatera dan orangutan kalimantan merupakan dua jenis satwa primata yang dipandang sangat menarik oleh banyak pihak untuk keperluan meningkatkan kesadaran konservasi serta untuk menggalang partisipasi semua pihak dalam aksi konservasi. Peranan pentingnya dari aspek ekologis juga telah menyebabkan jenis primate ini menjadi perhatian para pencinta dan pemerhati primata.

Melalui serangkaian proses yang panjang, maka pada akhirnya tersusunlah Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017 ini. Proses panjang ini diawali dengan diselenggarakannya *Orangutan Population and Habitat Viability Assessment* (PHVA) pada tanggal 15-18 Januari 2004 di Jakarta, kemudian proses berlanjut dengan Workshop Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Sumatera di Berastagi pada tanggal 20-23 September 2005 yang selanjutnya diikuti Workshop Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Kalimantan di Pontianak pada tanggal 12-14 Oktober 2005 serta Bedah Buku dan Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi penyelamatan Orangutan dan Habitatnya di Kalimantan Timur di Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman, Samarinda pada tanggal 14-15 Juni 2006. Disamping itu, Lokakarya para pihak "Masa Depan Habitat Orangutan dan Pembangunan di Kawasan Hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru" yang diselenggarakan pada tanggal 17-18 Januari 2006 di Sibolga juga telah memberikan kontribusi.

Kami menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat aktif dan atau memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, di antaranya: Conservation International – Indonesia, Leuser Development Programme, SOCP, Pan Eco, APAPI, SEAPA dan IUCN/SSC – Primate Specialist Group (untuk Workshop di Berastagi); Fauna & Flora International, Yayasan BOS, UNEP-UNESCO/GRASP, The Nature Conservancy, Yayorin - OFI, Yayasan Palung serta WWF (untuk Workshop di Pontianak); juga Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman, PT KPC, Tropenbos Indonesia, TNC, BOSF, WWF, MAPFLOFA Fahutan Unmul dan BEBSiC (untuk lokakarya di Samarinda); yang telah memprakarsai serta memberikan bantuan baik teknis maupun finansial sehingga terselenggara-nya workshop serta lokakarya tersebut di atas.

Ucapan yang sama disampaikan kepada Orangutan Conservation Services Program - USAID dan Asosiasi Pemerhati dan Ahli Primata Indonesia (APAPI) yang telah membantu Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dalam penyelenggaraan Lokakarya Finalisasi Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia di Jakarta, pada tanggal 15 – 16 November 2007 serta dalam proses penyelesaian dokumen ini.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan sangat mengharapkan agar semua pihak pemangku kepentingan orangutan dapat terus bekerjasama, berkoordinasi dan bersinergi untuk melindungi orangutan dan habitatnya. Sekali lagi, besar harapan kita agar generasi mendatang masih akan bisa

melihat dan mengenal orangutan karena mereka masih terjaga keberadaannya di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan dan tidak hanya dari film atau buku sejarah atau dari fosilnya saja.

Direktur Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Pelaksana Tugas,

ttd
I Made Subadia G.

DAFTAR ISI

Peraturan Menteri Kehutanan	iii
Kata Pengantar Menteri Kehutanan	v
Ucapan terimakasih	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Kotak	xii
Daftar Istilah	xiii
Daftar Singkatan	xvi
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi, Maksud dan Tujuan	3
B.1. Visi	3
B.2. Maksud	3
B.3. Tujuan dan Sasaran	3
II. Orangutan Saat Ini dan Yang Akan Datang	4
A. Populasi dan Habitat.....	4
A.1. Orangutan Sumatera (<i>Pongo abelii</i>)	4
A.2. Orangutan Borneo (<i>Pongo pygmaeus</i>).....	5
B. Distribusi Geografis dan Variasi Kepadatan	6
C. Kebijakan dan Aturan yang Terkait dengan Orangutan	7
D. Ancaman	8
E. <i>Rescue</i> , Rehabilitasi dan Reintroduksi	9
F. Konservasi <i>ex-situ</i>	11
G. Penelitian.....	11
III. Strategi dan Rencana Aksi Nasional Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017.....	13
A. Strategi dan Program Pengelolaan Konservasi Orangutan.....	13
A.1 Strategi Meningkatkan pelaksanaan konservasi Insitu sebagai kegiatan utama penyelamatan orangutan di habitat aslinya	13
A.2 Strategi mengembangkan konservasi Eksitu sebagai bagian dari Dukungan Konservasi In-situ Orangutan	15
A.3 Strategi meningkatkan penelitian untuk mendukung konservasi Orangutan	16
B. Strategi dan Program Aturan dan Kebijakan	18
B.1 Strategi mengembangkan dan mendorong terciptanya kawasan konservasi daerah berdasarkan karakteristik Ekosistem, Potensi, Tata Ruang Wilayah, Status Hukum dan Kearifan Masyarakat	18
B.2 Strategi Meningkatkan Implementasi dan Menyempurnakan Berbagai Peraturan Perundangan untuk Mendukung Keberhasilan Konservasi Orangutan.....	19
C. Strategi dan Program Kemitraan dan Kerjasama dalam Mendukung Konservasi Orangutan Indonesia	20
C.1 Strategi Meningkatkan dan Memperluas Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat untuk Berperan Aktif dalam Kegiatan Konservasi Orangutan Indonesia	20
C.2 Strategi Mengembangkan Kemitraan lewat pemberdayaan Masyarakat.....	21

C.3 Strategi Menciptakan dan Memperkuat Komitmen, Kapasitas dan Kapabilitas Pihak Pelaksana Konservasi Orangutan di Indonesia	22
D. Strategi dan Program Komunikasi dan Penyadartahuan Masyarakat untuk Konservasi Orangutan di Indonesia	22
E. Pendanaan untuk Mendukung Konservasi Orangutan	23
IV. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017	25
A. Monitoring dan Evaluasi Strategi dan Program Pengelolaan Konservasi Orangutan	25
B. Monitoring dan Evaluasi Strategi dan Program Aturan dan Kebijakan.....	28
C. Monitoring dan Evaluasi Strategi Program Kemitraan dan Kerjasama Dalam Mendukung Konservasi Orangutan Indonesia	30
D. Monitoring dan Evaluasi Strategi Program Komunikasi dan Penyadartahuan Masyarakat untuk Konservasi Orangutan	32
E. Monitoring dan Evaluasi Strategi Program Pendanaan untuk Mendukung Konservasi Orangutan	33

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkiraan populasi orangutan	5
Tabel 2	Perkiraan luas habitat dan jumlah orangutan di Sumatera	6
Tabel 3	Perkiraan jumlah orangutan Borneo pada blok habitat Kalimantan	7
Tabel 4	Kebijakan dan aturan yang terkait dengan konservasi orangutan	8
Tabel 5	Ancaman terhadap orangutan Indonesia	10
Tabel 6	Program dan rencana aksi meningkatkan pelaksanaan Konservasi insitu sebagai kegiatan utama penyelamatan orangutan di habitat aslinya	16
Tabel 7	Program dan rencana aksi mengembangkan konservasi eksitu sebagai bagian dari dukungan untuk konservasi insitu Orangutan	17
Tabel 8	Program dan rencana aksi meningkatkan penelitian untuk mendukung konservasi orangutan ...	19
Tabel 9	Strategi meningkatkan implementasi dan menyempurnakan berbagai peraturan perundangan untuk mendukung keberhasilan konservasi orangutan	20
Tabel 10	Program dan Rencana Aksi meningkatkan implementasi dan Menyempurnakan Berbagai Peraturan Perundangan Untuk Mendukung keberhasilan konservasi Orangutan	21
Tabel 11	Program dan rencana aksi meningkatkan dan memperluas kemitraan antara pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan konservasi orangutan Indonesia	23
Tabel 12	Program dan rencana aksi mengembangkan kemitraan lewat pemberdayaan masyarakat	23
Tabel 13	Program dan rencana aksi menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas dan kapabilitas pihak pelaksana konservasi orangutan Indonesia	24
Tabel 14	Program dan rencana aksi meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan Komitmen mengenai pentingnya upaya konservasi orangutan Indonesia	25
Tabel 15	Program dan rencana aksi meningkatkan dan mempertegas peran pemerintah, pemda, LSM serta mencari dukungan lembaga dalam dan luar negeri untuk penyediaan dana bagi konservasi orangutan Indonesia	26
Tabel 16	Monitoring dan evaluasi strategi dan program pengelolaan konservasi orangutan	27
Tabel 17	Monitoring dan evaluasi strategi dan program aturan dan kebijakan	30
Tabel 18	Monitoring dan evaluasi strategi dan program kemitraan dan kerjasama dalam mendukung konservasi orangutan Indonesia	32
Tabel 19	Monitoring dan evaluasi strategi dan program komunikasi dan penyadartahuan masyarakat untuk konservasi orangutan	34
Tabel 20	Monitoring dan evaluasi strategi dan program pendanaan untuk mendukung konservasi orangutan	35

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Distribusi Orangutan di dunia	1
2. Gambar 2 Orangutan Sumatera	1
3. Gambar 3 Orangutan Kalimantan Tengah	1
4. Gambar 4 Distribusi penyebaran Orangutan Kalimantan 1930-2004	2
5. Gambar 5 Distribusi Orangutan Sumatera	5
6. Gambar 6 Distribusi Orangutan Borneo	6

DAFTAR KOTAK

1. Kotak 1 BMP	11
2. Kotak 2 Penelitian jangka panjang harus berkelanjutan	13

DAFTAR ISTILAH

- Alluvial adalah tanah yang baru terbentuk/masih muda dengan tingkat kesuburan yang tinggi (biasanya dari muntahan gunung berapi)
- Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami
- Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan
- Credit union* adalah sebuah institusi keuangan simpan pinjam (a cooperative depository financial institution whose members can obtain loans from their combined savings)
- Data base adalah Sistem pangkalan data
- Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi
- Eksitu adalah upaya konservasi di luar habitat alaminya
- Epidemik adalah kasus penyakit baru pada populasi dan dalam periode tertentu
- Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami
- Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan
- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
- Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
- Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- Identifikasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk mengenal jenis, keadaan umum, status populasi dan tempat hidupnya yang dilakukan di dalam habitatnya
- Insitu adalah upaya konservasi di dalam habitat alaminya.
- Inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya mengetahui kondisi dan status populasi secara lebih rinci serta daerah penyebarannya yang dilakukan di dalam dan di luar habitatnya maupun di lembaga konservasi.
- Jenis tumbuhan atau satwa adalah jenis yang secara ilmiah disebut species atau anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut sub-species baik di dalam maupun di luar habitatnya.
- Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Kawasan Konservasi Daerah adalah kawasan konservasi yang ditetapkan melalui peraturan daerah, dan bukan di dalam atau sama dengan kawasan konservasi yang sudah ada
- Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (UU Tata Ruang).
- Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kebun binatang adalah tempat di mana hewan dipelihara dalam lingkungan buatan serta dipertunjukkan kepada publik

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya

Konversi adalah perubahan penggunaan lahan menjadi peruntukan lain

Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa di luar habitatnya (*ex situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah

Menteri Kehutanan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan

Micro finance adalah kredit usaha kecil

Monitoring (pemantauan) adalah proses pemantauan pelaksanaan rencana kerja

Multistakeholder atau para pemangku kepentingan adalah individu atau lembaga yang memiliki kepentingan dalam mengerjakan dan atau terlibat kepada sesuatu aktivitas

Pandemik adalah penyakit yang menyebar pada kawasan-kawasan tertentu pada saat bersamaan

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya adalah upaya menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa agar tidak punah

Populasi adalah kelompok individu dari jenis tertentu di tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya

Red list adalah daftar merah spesies-spesies terancam punah yang dikeluarkan oleh Badan Konservasi Dunia

Rehabilitasi adalah proses perlakuan medis hingga mereka sehat kembali dan agar mereka dapat belajar serta mengasah kemampuan hidup di alam agar dapat hidup mandiri di habitat alaminya kelak

Reintroduksi adalah pelepasliaran satwa hasil rehabilitasi ke habitat alam asal spesies tersebut

Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas

Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem

Studbook adalah buku data informasi status, kondisi, sejarah hidup hewan yang terdapat di kebun binatang, taman safari, pusat rehabilitasi

Taman nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi

Taman Safari adalah adalah tempat wisata keluarga yang berwawasan lingkungan dan berorientasi habitat satwa pada alam bebas

Translokasi adalah proses pemindahan orangutan liar sehat dari habitatnya yang rusak ke habitatnya yang baru, yang lebih aman dan lebih baik

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang

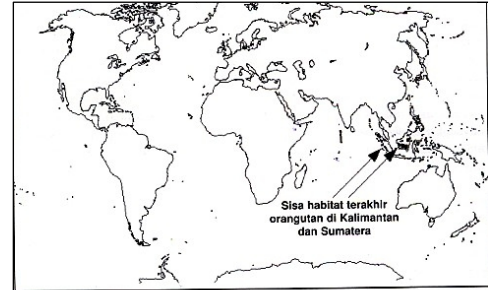
DAFTAR SINGKATAN

APAPI	Asosiasi Pemerhati dan Ahli Primata Indonesia	KSA	Kawasan Suaka Alam
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ASEAN WEN	ASEAN Wildlife Enforcement Network	LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
APL	Areal Penggunaan Lain	MoU	Memorandum of Understanding
Baplan	Badan Planologi Kehutanan	NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
Bappeda	Badan Perencana dan Pembangunan Daerah	OCSF	Orangutan Conservation Service Program
Bappenas	Badan Perencana dan Pembangunan Nasional	OFI	Orangutan Foundation International
BKSDA	Balai Konservasi Sumberdaya Alam	OF-UK	Orangutan Foundation-UK
BMP	Better Management Practices (Petunjuk Teknis Penanganan)	Pemda	Pemerintah daerah
BOSF	Borneo Orangutan Survival Foundation	Permenhut	Peraturan Menteri Kehutanan
BPDAS	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	PSSP	Pusat Studi Satwa Primata
BPK	Bina Produksi Kehutanan	PHKA	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
CBSG	Conservation Breeding Specialist Group	PHVA	<i>Population and Habitat Viability Assessment</i>
CI	Conservation International	PKBSI	Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia
CITES	Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora / Perjanjian Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah	RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
CSR	Corporate Social Responsibility- Program pemberdayaan masyarakat dari perusahaan	RKT	Rencana Kerja Tahunan
DitKesWan	Direktorat Kesehatan Hewan	RTRWP	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Province Spatial Plan)
DNA	Deoxy-ribonucleic Acid	SD	Sekolah Dasar
FFI	Fauna and Flora International	SDA	Sumber Daya Alam
FGD	Focus Group Discussion	SIV	Simian Immunodeficiency Virus
FKH	Fakultas Kedokteran Hewan	SMP	Sekolah Menengah Pertama
GRASP	Great Apes Survival Project	SOP	Standard Operating Procedures (Protap)
HCVF	High Conservation Value Forest (Hutan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi)	SOCP	Sumatran Orangutan Conservation Program
HIV	Human Immunodeficiency Virus	TNC	The Nature Conservancy
HTI	Hutan Tanaman Industri	TNGL	Taman Nasional Gunung Leuser
HPH	Hak Pengusahaan Hutan	UU	Undang-undang
HGU	Hak Guna Usaha (Land cultivation rights)	UGM	Universitas Gajah Mada
IPB	Institut Pertanian Bogor	UNEP	United Nations Environmental Program
IUCN	International Union for Conservation and Natural Resources	UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Culture Organization
JPL	Jaringan Pendidikan lingkungan	UPT	Unit Pelaksana Teknis
KBNK	Kawasan Budidaya Non Kehutanan	USAID	United States Agency for International Development
KKD	Kawasan Konservasi Daerah	UU	Undang-Undang (Regulation)
KPA	Kawasan Pelestarian Alam	WCS	Wildlife Conservation Society
		WWF	World Wide Fund for Nature
		Yayorin	Yayasan Orangutan Indonesia

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, sementara tiga kerabatnya, yaitu; gorila, simpanse, dan bonobo hidup di Afrika. Kurang dari 20.000 tahun yang lalu orangutan dapat dijumpai di seluruh Asia Tenggara, dari Pulau Jawa di ujung selatan sampai ujung utara Pegunungan Himalaya dan Cina bagian selatan. Akan tetapi, saat ini jenis kera besar itu hanya ditemukan di Sumatera dan Borneo (Kalimantan), 90% berada di Indonesia (Gambar 1). Penyebab utama mengapa terjadi penyempitan daerah sebaran adalah karena manusia dan orangutan menyukai tempat hidup yang sama, terutama dataran *alluvial* di sekitar daerah aliran sungai dan hutan rawa gambut. Pemanfaatan lahan tersebut untuk aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya manusia umumnya berakibat fatal bagi pihak orangutan.



Gambar 1. Distribusi Orangutan di Dunia

Para ahli primata saat ini sepakat untuk menggolongkan orangutan yang hidup di Sumatera sebagai *Pongo abelii* (Gambar 2) yang berbeda dari *Pongo pygmaeus* (Gambar 3) yang menempati hutan-hutan dataran rendah di Borneo. Dibandingkan dengan kerabatnya di Borneo, orangutan sumatera menempati daerah sebaran yang lebih sempit. Orangutan di Sumatera hanya menempati bagian utara pulau itu, mulai dari Timang Gajah, Aceh Tengah sampai Sitinjak di Tapanuli Selatan. Sementara itu, di Borneo orangutan dapat ditemukan di Sabah, Sarawak, dan hampir seluruh hutan dataran rendah Kalimantan, kecuali Kalimantan Selatan dan Brunei Darussalam. Orangutan di Borneo dikelompokkan ke dalam tiga anak jenis, yaitu *Pongo pygmaeus pygmaeus* yang berada di bagian utara Sungai Kapuas sampai ke timur laut Sarawak; *Pongo pygmaeus wurmbii* yang ditemukan mulai dari selatan Sungai Kapuas hingga bagian barat Sungai Barito; dan *Pongo pygmaeus morio*, yang tersebar mulai dari Sabah sampai ke selatan mencapai Sungai Mahakam di Kalimantan Timur.



Foto : Jef Oonk

Gambar 2. Orangutan Sumatera

Orangutan dapat dijadikan '*umbrella species*' (spesies payung) untuk meningkatkan kesadaran konservasi masyarakat. Kelestarian orangutan menjamin kelestarian hutan yang menjadi habitatnya, sehingga diharapkan kelestarian makhluk hidup lain ikut terjaga pula. Sebagai pemakan buah, orangutan merupakan agen penyebar biji yang efektif untuk menjamin regenerasi hutan. Orangutan juga sangat menarik dari sisi ilmu pengetahuan karena kemiripan karakter biologi satwa itu dengan manusia. Sebagai satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, orangutan memiliki potensi menjadi ikon pariwisata untuk Indonesia.

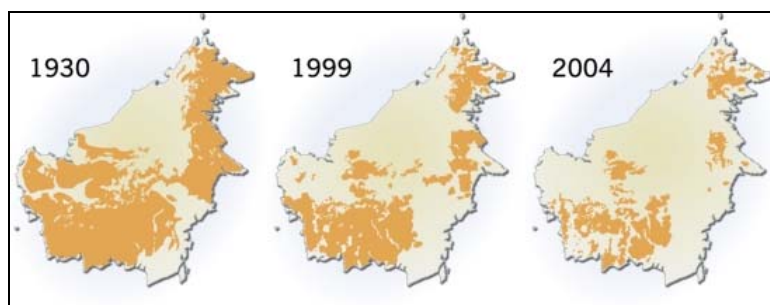


Foto : Wahyu Susanto

Gambar 3. Orangutan Kalimantan Tengah

Orangutan menyukai hutan hujan tropis dataran rendah sebagai tempat hidupnya, sehingga perlindungan ekosistem tersebut sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup satwa itu. Meskipun Pemerintah telah membangun sistem kawasan konservasi seluas 6,5 juta hektar di Sumatera bagian utara dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, upaya pengelolaan kawasan hutan yang menjadi habitat orangutan di luar taman nasional dan cagar alam tidak kalah pentingnya. Pemanfaatan kawasan hutan, baik untuk industri kayu maupun pertanian, yang tidak memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan terbukti berdampak sangat buruk bagi keberadaan orangutan. Konflik yang terjadi antara orangutan dan manusia di luar kawasan konservasi bahkan tidak jarang merugikan pihak pengusaha dan masyarakat.

Penyusutan dan kerusakan kawasan hutan dataran rendah yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan selama sepuluh tahun terakhir telah mencapai titik kritis yang dapat membawa bencana ekologis skala besar bagi masyarakat. Bagi orangutan, kerusakan kawasan hutan telah menurunkan jumlah habitat orangutan sebesar 1-1,5% per tahunnya di Sumatera. Jumlah kehilangan habitat di Kalimantan yaitu 1,5-2% per tahunnya, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Sumatera. Kerusakan hutan dan habitat orangutan di Kalimantan (Gambar 4) menyebabkan distribusi orangutan menjadi terfragmentasi di kantong-kantong habitat (Revisi PHVA 2004). Nasib orangutan juga diperburuk dengan ancaman perburuan untuk dijadikan satwa peliharaan, bahkan sebagai sumber makanan bagi sebagian masyarakat. Kondisi yang sangat mengkhawatirkan tersebut telah menempatkan orangutan Sumatera ke dalam kategori kritis/sangat terancam punah (*critically endangered*) di dalam daftar merah IUCN (2007), sebuah badan dunia yang memantau tingkat keterancamannya secara global. Meskipun orangutan di Kalimantan ditempatkan pada posisi terancam punah/*endangered*, tidak berarti masa depan primata itu lebih cerah dibandingkan kerabatnya di Sumatera. Hanya tindakan segera dan nyata dari semua pemangku kepentingan untuk melindungi orangutan di kedua pulau tersebut yang dapat menyelamatkan satu-satunya kera besar Asia dari ancaman kepunahan.



Gambar 4. Distribusi Penyebaran Orangutan Kalimantan 1930-2004

Kondisi orangutan yang sangat memprihatinkan telah mendorong para peneliti, pelaku konservasi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi terbaik yang dapat menjamin keberadaan primata itu di tengah upaya negara menyejahterakan masyarakatnya. Serangkaian pertemuan untuk menyusun

strategi konservasi berdasarkan kondisi terkini orangutan telah diadakan, dimulai dari Lokakarya Pengkajian Populasi dan Habitat (*Population Habitat and Viability Analysis*) di Jakarta pada 2004, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan multipihak di Berastagi, Sumatera Utara, pada September 2005, dan di Pontianak, Kalimantan Barat pada Oktober 2005, serta di Samarinda pada Juni 2006. Ketiga pertemuan terakhir menyertakan pula pemerintah daerah di seluruh daerah sebaran orangutan, kalangan industri perkebunan kelapa sawit, dan utusan masyarakat, selain peneliti dan pelaku konservasi. Dialog yang dilakukan antara berbagai pihak dengan latar belakang kepentingan yang berbeda di ke-tiga pertemuan itu telah menghasilkan serangkaian rekomendasi yang mencerminkan keinginan baik semua pihak untuk melestarikan orangutan.

Sebagai kelanjutan, pemerintah melalui Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) bekerjasama dengan Asosiasi Peneliti dan Ahli Primata Indonesia (APAPI), serta didukung oleh *Orangutan Conservation Services Program* (OCSP)- USAID, telah mensintesis semua butir rekomendasi dari pertemuan Berastagi dan Pontianak dan Samarinda melalui pembahasan diskusi kelompok terfokus (FGD) di Jakarta 6 November 2007, FGD di Bogor 30-31 Oktober 2007, FGD Jakarta 8 November 2007, Lokakarya di Jakarta 15-16 November dan Finalisasi di Bogor 20-21 November 2007 ke dalam suatu *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Nasional Orangutan*. Penyusunan strategi dan rencana aksi ini melibatkan kembali berbagai pihak yang berperan serta menghasilkan seluruh butir rekomendasi yang ada. Dengan demikian, proses yang terjadi juga dapat dipandang sebagai upaya mengevaluasi pencapaian target konservasi sejak rekomendasi aksi dicanangkan, selain sebagai upaya memperbarui informasi sebaran dan populasi orangutan. Seluruh rangkaian proses ini diharapkan menghasilkan sebuah acuan yang dapat diterima dan dijalankan semua pihak, sehingga dalam sepuluh tahun yang akan datang kondisi orangutan dan hutan dataran rendah yang menjadi habitatnya akan menjadi lebih baik dari saat ini.

B. Visi, Maksud dan Tujuan

B.1. Visi

Terjaminnya keberlanjutan populasi orangutan dan habitatnya melalui kemitraan para pihak.

B.2. Maksud

Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Nasional Orangutan disusun sebagai upaya merumuskan kesepakatan para pihak ke dalam serangkaian rekomendasi aksi yang diharapkan dapat menjamin keberlanjutan populasi orangutan di dalam proses pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

B.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan disusunnya Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan adalah sebagai acuan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan konservasi insitu dan eksitu, serta merancang program pembangunan yang tidak mengancam keberlanjutan populasi orangutan, sehingga kondisi orangutan di alam menjadi lebih baik dalam sepuluh tahun mendatang. Sasaran yang ingin dicapai sampai tahun 2017 adalah :

1. Populasi dan habitat alam orangutan sumatera dan kalimantan dapat dipertahankan atau dalam kondisi stabil.
2. Rehabilitasi dan reintroduksi orangutan ke habitat alamnya dapat diselesaikan pada 2015.
3. Dukungan publik terhadap konservasi orangutan sumatera dan kalimantan pada habitat alamnya meningkat
4. Pemerintah daerah dan pihak industri kehutanan serta perkebunan menerapkan tata kelola yang menjamin keberlanjutan populasi orangutan dan sumberdaya alam.
5. Pemahaman dan penghargaan semua pihak terhadap keberadaan orangutan di alam meningkat.

II. ORANG UTAN SAAT INI DAN YANG AKAN DATANG

Lokakarya Pengkajian Status Populasi dan Habitat (*Population and Habitat Viability Analysis/PHVA*) yang diselenggarakan pada Januari 2004 lalu memberikan gambaran terkini tentang sebaran dan status populasi orangutan di Sumatera dan Kalimantan. Perkiraan ukuran populasi orangutan Sumatera dan Kalimantan dapat dilihat pada Tabel 1. Jumlah populasi orangutan Sumatera jauh berada di bawah kerabatnya di Borneo (Kalimantan, Sabah dan Sarawak). Lokakarya tersebut juga menampilkan ukuran populasi orangutan Borneo yang lebih besar dibandingkan dengan berbagai laporan sebelumnya. Hal itu hendaknya tidak dipandang sebagai keberhasilan upaya konservasi, tetapi lebih karena perbaikan metode survei yang didukung oleh teknologi penginderaan jauh (*remote sensing*) yang lebih canggih.

Tabel 1. Perkiraan populasi orangutan

Lokasi	Perkiraan Jumlah
Sumatera	6667
Borneo	
1. Sabah	11017
2. Kalimantan Timur	4825
3. Kalimantan Tengah	>31300
4. Kalimantan Barat and Sarawak	7425
Total Borneo	54567
Total Populasi Liar	61234

Sumber : (revisi PHVA 2004, Wich, dkk draft)

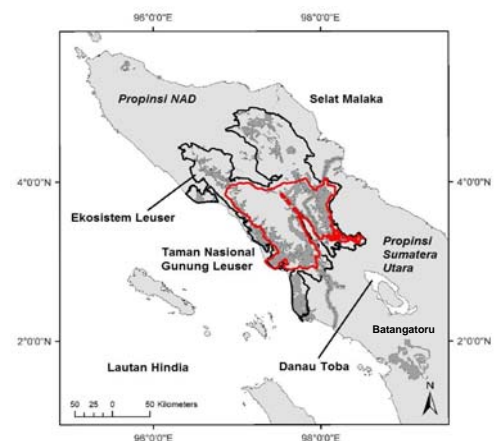
Para peneliti yang melaporkan hasil survei mereka di Lokakarya PHVA 2004 sepakat bahwa kerusakan dan fragmentasi hutan tropis dataran rendah merupakan penyebab utama penyusutan populasi orangutan yang sangat drastis di berbagai lokasi di Sumatera dan Kalimantan. Fragmentasi hutan telah membagi populasi orangutan di Sumatera ke dalam sebelas kantong populasi dengan ukuran yang berbeda-beda. Di antara kesebelas blok habitat itu hanya tiga blok dilaporkan mempunyai populasi lebih dari 500 individu, yang merupakan ukuran minimum untuk menjamin keberlanjutan populasi orangutan. Para peneliti berpendapat bahwa hanya pada ukuran populasi seperti itu orangutan mempunyai kekayaan genetik yang cukup untuk membantunya menghadapi berbagai tantangan perubahan lingkungan. Sebaliknya, populasi yang berukuran kurang dari 500 individu akan menjadi sangat rentan terhadap berbagai risiko kepunahan, jika tidak dibantu dengan upaya perlindungan dan pengelolaan populasi.

A. Populasi dan Habitat

1. Orangutan Sumatera, *Pongo abelii*

Saat ini hampir semua orangutan sumatera hanya ditemukan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, dengan Danau Toba sebagai batas paling selatan sebarannya. Hanya 2 populasi yang relatif kecil berada di sebelah barat daya danau, yaitu Sarulla Timur dan hutan-hutan di Batang Toru Barat. Peta sebaran orangutan sumatera yang merupakan kompilasi terkini para peneliti disajikan pada Gambar 5 (sumber: Wich, dkk draft).

Populasi orangutan terbesar di Sumatera dijumpai di Leuser Barat (2.508 individu) dan Leuser Timur (1.052 individu), serta Rawa Singkil (1.500 individu). Populasi lain yang diperkirakan potensial untuk bertahan dalam jangka panjang (*viable*) terdapat di Batang Toru,



Gambar 5. Distribusi Orangutan Sumatera

Sumatera Utara, dengan ukuran sekitar 400 individu. Data ukuran populasi orangutan di berbagai blok habitat di Sumatera selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkiraan luas habitat dan jumlah orangutan di Sumatera

No	Unit Habitat	Perkiraan Jumlah Orangutan	Blok Habitat	Hutan Primer (km ²)	Habitat Orangutan (km ²)
1.	Seulawah	43	Seulawah	103	85
2.	Aceh Tengah Barat	103	Beutung (Aceh Barat) Inge	1297 352	261 10
3.	Aceh Tengah Timur	337	Bandar-Serajadi	2117	555
4.	Leuser Barat	2508	Dataran Tinggi Kluet (Aceh Barat Daya) G. Leuser Barat Rawa Kluet G. Leuser/Demiri Timur Mamas-Bengkung	1209 1261 125 358 1727	934 594 125 273 621
5.	Sidiangkat	134	Puncak Sidiangkat/Bukit. Ardan	303	186
6.	Leuser Timur	1052	Tamiang Kapi and Hulu Lesten Lawe Sigala-gala Sikundur-Langkat	1056 592 680 1352	375 220 198 674
7.	Tripa Swamp	280	Rawa Tripa (Babahrot)	140	140
8.	Trumon-Singkil	1500	Rawa Trumon-Singkil	725	725
9.	Rawa Singkil Timur	160	RawaSingkil Timur	80	80
10.	Batang Toru Barat	400	Batang Toru Barat	600	600
11.	Sarulla Timur	150	Sarulla Timur	375	375
Total		6667		14452	7031

Sumber : PHVA 2004 dan revisi PHVA 2004, Wich, dkk draft.

A.2. Orangutan Borneo, *Pongo pygmaeus*

Orangutan di Borneo sebagian besar mendiami hutan dataran rendah dan hutan rawa di Sabah, bagian barat daya Sarawak, Kalimantan Timur, serta bagian barat daya Kalimantan, antara Sungai Kapuas dan Sungai Barito (Gambar 6; sumber Wich, dkk draft). Para ahli mengamati adanya perbedaan yang cukup nyata di antara populasi orangutan di Borneo. Oleh karenanya, populasi orangutan borneo disepakati dibedakan menjadi tiga (3) kelompok geografi atau anak jenis, yaitu:

- o *Pongo pygmaeus pygmaeus*, di bagian Barat Laut Kalimantan, yaitu utara dari Sungai Kapuas sampai ke Timur Laut Sarawak;
- o *Pongo pygmaeus wurmbii*, di bagian Selatan dan Barat Daya Kalimantan, yaitu antara sebelah Selatan Sungai Kapuas dan Barat Sungai Barito; serta
- o *Pongo pygmaeus morio*, di Sabah sampai Sungai Mahakam di Kalimantan Timur.

Populasi terbesar (sekitar 32.000 individu) dijumpai di hutan gambut di sebelah Utara Sungai Kapuas. Tetapi populasi tersebut tidak berada di dalam sebuah habitat yang berkesinambungan, melainkan tersebar ke dalam beberapa kantong habitat dengan ukuran populasi yang berbeda-beda. Populasi orangutan ini sangat terkait dengan perubahan hutan di Kalimantan. Kerusakan hutan yang cukup tinggi di Kalimantan menyebabkan banyak habitat orangutan yang hilang. Perkiraan jumlah orangutan borneo di berbagai lokasi dapat dilihat pada Tabel 3.



Gambar 6. Distribusi Orangutan Borneo

Tabel 3. Perkiraan jumlah orangutan Borneo pada blok habitat Kalimantan

No.	Sub Spesies dan Nama Lokasi	Area (km ²)	Perkiraan Populasi Orangutan
A.	<i>Pongo pygmaeus pygmaeus</i>		
1	Batang Ai (Sarawak)	240	119–580
2	Lanjak Entimau (Sarawak)	1688	1024–1181
3	Betung Kerihun	4500	1330–2000
4	Danau Sentarum	1090	500
5	Rawa Kapuas Hulu (Selatan Sungai Kapuas, utara Melawi)	T?	?
	Total	3000–4500	<7500
	<i>Pongo pygmaeus wumbii</i>		
1	Gunung Palung	900	2,500
2	Bukit Baka	350	175
3	Bukit Rongga & Parai	4200	1000
4	Tanjung Puting	4150	6000
5	Lamandau	760	1200
6	Mawas	5010	3500
7	Sebangau	5780	6900
8	Ketingan	2800	3000
9	Rungan Kahayan	2000	1000
10	Arut Belantikan	5100	6000
11	Seruyan	3000	1000
12	Bukit Raya	500	500
13	Sei. Kahayan & Sei. Sambah	1500	1000
14	Sei. Sambah & Sei Katingan	1000	500
15	Sebangau Kahayan	700	700
16	Kahayan Kapuas	4000	300
17	Tanjung Keluang	2000	200
18	Cagar Alam Pararaum	500	>500
19	Cagar Alam B.Spt	>2,000	>500
	Total	>34975	>46250
C	<i>Pongo pygmaeus morio</i>		
1	Taman Nasional Kutai	750	600
2	DAS Lesan (termasuk Hutan Lindung Sungai Lesan)	500	400
3	DAS Kelai (incl. Gunung Gajah, Wehea, dan beberapa areal HPHs)	4000	2500
4	Sangatta – Bengalon & Muara Wahau	sangat terfragmentasi	175
5	DAS Segah	3500	100
6	Samarinda, Muara Badak, Marang Kayu	300+	200
7	Pegunungan Kapur Sangkulirang/Mangkalihat	1,500	750
8	Rawa Sebuku/Sembakung	500	100
	Total	10750	4825

Sumber : PHVA dan revisi PHVA 2004, Wich, dkk draft

B. Distribusi Geografis dan Variasi Kepadatan

Orangutan dapat hidup pada berbagai tipe hutan, mulai dari hutan dipterokarpus perbukitan dan dataran rendah, daerah aliran sungai, hutan rawa air tawar, rawa gambut, tanah kering di atas rawa bakau dan nipah, sampai ke hutan pegunungan. Di Borneo orangutan dapat ditemukan pada ketinggian 500 m di atas permukaan laut (dpl), sedangkan kerabatnya di Sumatera dilaporkan dapat mencapai hutan pegunungan pada 1.000 m dpl.

Kepadatan orangutan, baik di Sumatera maupun di Kalimantan, menurun drastis dengan bertambahnya ketinggian dari atas permukaan laut. Meskipun ada laporan yang menyatakan individu jantan soliter Sumatera dapat ditemukan sampai ketinggian 1.500 m dpl, sebagian besar populasi orangutan dijumpai jauh di bawah ketinggian itu, yaitu di hutan rawa dan dataran rendah. Sayangnya, tipe-tipe hutan itulah

yang menjadi target utama pembangunan industri kehutanan dan pertanian, sehingga tidak mengherankan jika konflik antara manusia dan orangutan juga paling sering terjadi di sana.

Distribusi orangutan lebih ditentukan oleh faktor ketersediaan pakan yang disukai daripada faktor iklim. Orangutan termasuk satwa *frugivora* (pemakan buah), walaupun primata itu juga mengkonsumsi daun, liana, kulit kayu, serangga, dan terkadang memakan tanah dan vertebrata kecil. Hingga saat ini tercatat lebih dari 1.000 spesies tumbuhan, jamur dan hewan kecil yang menjadi pakan orangutan.

Kepadatan orangutan di Sumatera dan Kalimantan bervariasi sesuai dengan ketersediaan pakan. Densitas paling tinggi terdapat di daerah dataran banjir (*flood-plain*) dan hutan rawa gambut. Di Borneo terdapat 4 lokasi yang memiliki densitas rata-rata $2,9 \pm 0,5$ individu per Km^2 . Sementara itu, di Sumatera terdapat 3 lokasi dengan densitas rata-rata $6,2 \pm 1,4$ individu per Km^2 . Daerah alluvial merupakan daerah dengan densitas tertinggi kedua, dengan 6 lokasi di Borneo yang memiliki rata-rata densitas $2,3 \pm 0,8$ individu per Km^2 , dan 3 lokasi di Sumatera dengan rata-rata densitas $3,9 \pm 1,4$ individu per Km^2 . Di hutan perbukitan, orangutan ditemukan dalam densitas yang jauh lebih rendah dibandingkan kedua tipe hutan yang telah disebutkan sebelumnya (di Borneo rata-rata densitas $0,6 \pm 0,4$ individu per Km^2 dan di Sumatera rata-rata $1,6 \pm 0,5$ individu per Km^2).

C. Kebijakan dan Aturan Yang Terkait Dengan Orangutan

Salah satu undang-undang yang sangat penting adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Tabel 4. Kebijakan dan aturan yang terkait dengan konservasi orangutan

No	Perundangan/Kebijakan	Cakupan aspek keanekaragaman hayati/Orang Utan
UMUM		
1	UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta PP NO.7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan pada usaha perlindungan seperti perlindungan sistem penyangga, pengawetan keanekaragaman jenis, aktivitas apa saja yang dilarang dan apa sanksi-sanksinya. UU ini juga memberikan uraian tentang kawasan suaka alam, peran serta masyarakat dan kawasan pelestarian. Penekanan lebih pada kawasan konservasi daratan. • Tidak mengatur pengelolaan keanekaragaman genetik.
2	UU No 24/1992 Tentang Penataan Ruang beserta Keppres No 32/1990 tentang kawasan lindung, Diperbaharui dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan alih fungsi • Pengelolaan kawasan lindung • Keppres No 32/1990 memberikan wewenang kepada pemda untuk menetapkan kawasan lindung tetapi tidak untuk mengelolanya
3	UU No 5/1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on Biological Diversity</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur konservasi dan pemanfaatan lestari, pembagian keuntungan yang adil dan alih teknologi • Mengatur perlindungan pengetahuan tradisional dan keamanan hayati
4	UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, hak kewajiban dan peran masyarakat, wewenang pengelolaan lingkungan hidup, pelestarian fungsi lingkungan hidup, persyaratan penataan lingkungan hidup, pengawasan, sanksi administrasi, audit lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
5	UU No 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS 2000 – 20004)	<ul style="list-style-type: none"> • Mencakup rencana pengelolaan berbagai ekosistem, tetapi tidak menyebutkan secara spesifik keanekaragaman hayati

No	Perundangan/Kebijakan	Cakupan aspek keanekaragaman hayati/Orang Utan
6	Tap MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan landasan peraturan perundangan mengenai pembaharuan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam
7	UU 32/2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 33/th 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah, termasuk pengelolaan sumberdaya alam Mengatur pembagian dana pembangunan antara pusat dan daerah, termasuk pendapatan dari pemanfaatan sumberdaya alam
8	UU No 14/2000 tentang Paten	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur hak paten, termasuk atas bahan hayati/mahluk hidup Perlindungan paten tidak diberikan apabila objek paten bertentangan dengan azas lingkungan hidup dan kesesusaian.
9	Agenda 21 Nasional, 1997 KLH melalui proses konsultasi terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Bab 16 berkaitan langsung dengan pengelolaan keanekaragaman hayati
10	Inisiatif perumusan RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam (RUU PSDA)	<ul style="list-style-type: none"> Usulan mengatur pengelolaan semua sumberdaya alam di bawah satu payung kebijakan, sebagai perwujudan TAP MPR No.IX/2001 Mengatur mekanisme konsultasi publik
SEKTORAL		
1	UU No 41/1999 tentang Kehutanan; Sudah diperbarui dengan Perpu No 1 tahun 2004 dan ditetapkan menjadi UU No.19 Tahun 2004 tentang kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur fungsi, perencanaan dan pengelolaan hutan, termasuk peran masyarakat luas Lebih mengatur perlindungan hutan sebagai kawasan dibandingkan sebagai ekosistem
2	Keppres No 43/1978, Ratifikasi CITES Institusi: Dephut sebagai otoritas pengelola, LIPI sebagai otoritas ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan, pelarangan dan pemantauan terhadap jenis flora dan fauna terutama yang terancam punah
3	Keppres No 48/1991 tentang Pengesahan Konvensi Lahan Basah (Ramsar) :Institusi : Dephut dan KLH	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan tentang konservasi lahan basah Menentukan situs lahan basah yang mempunyai kepentingan internasional
4	Inisiatif perumusan RUU Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetis	<ul style="list-style-type: none"> Berupaya mengatur akses pada sumberdaya genetik dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumberdaya genetik
5	RUU Pembalakan Liar	<ul style="list-style-type: none"> Pemberantasan kejahatan kehutanan dengan peradilan khusus. Percepatan proses penyidikan dan peradilan Perubahan alur proses penyidikan dan pemberkasan Sangsi pidana minimal Definisi pelaku yang lebih rinci dibanding KUHPidana Penguatan peran penyidik sipil
6	Inpres No. 4/2005 tentang percepatan pemberantasan pembalakan liar	<ul style="list-style-type: none"> Instruksi kepada 18 institusi negara untuk melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan dan memberikan prioritas pada upaya pemberantasan pembalakan liar Dibentuknya satuan kerja nasional (<i>national task force</i>) yang terdiri dari pejabat eselon I dari seluruh instansi yang diberikan instruksi dibawah koordinasi Menko Politik Hukum dan Keamanan Dibentuknya tim koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagai unit kerja dari <i>task force</i> yang anggotanya gabungan antara pejabat pemerintah dan LSM.

D. Ancaman

Pembukaan kawasan hutan merupakan ancaman terbesar terhadap lingkungan karena mempengaruhi fungsi ekosistem yang mendukung kehidupan di dalamnya. Selama periode tahun 1980-1990, hutan Indonesia telah berkurang akibat konversi menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman, kebakaran hutan, serta praktek pengusahaan hutan yang tidak berkelanjutan. Pengembangan otonomi daerah dan penerapan

desentralisasi pengelolaan hutan pada 1998 juga dipandang oleh banyak pihak sebagai penyebab peningkatan laju deforestasi di Indonesia. Pembangunan perkebunan dan izin usaha pemanfaatan kayu yang dikeluarkan pemerintah daerah turut berdampak terhadap upaya konservasi orangutan.

Semenjak desentralisasi diimplementasikan sepenuhnya pada tahun 2001, sebagian tanggungjawab pengelolaan kawasan hutan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemberian izin HPH 100 Ha yang terjadi pada tahun 2001-2002 dengan pola tebang habis menyebabkan pengelolaan hutan semakin sulit. Sementara itu perencanaan tata guna lahan seringkali tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologi dan konservasi sumberdaya alam. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah pengusahaan hutan dan izin konversi hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi area penggunaan lain (APL) yang dilakukan tanpa mentaati peraturan perundangan yang berlaku berperan sangat besar terhadap penyusutan populasi dan habitat orangutan. Perubahan penggunaan lahan umumnya tidak mempertimbangkan faktor ekologi dan konservasi.

Pertemuan yang diselenggarakan di Berastagi dan Pontianak telah mengidentifikasi berbagai ancaman yang berpotensi meningkatkan risiko kepunahan orangutan di Sumatera dan Kalimantan. Hasil dialog dengan berbagai pihak yang hadir di kedua pertemuan tersebut juga menyepakati berbagai intervensi yang harus dilakukan untuk menyelamatkan orangutan. Ringkasan jenis dan tingkatan ancaman yang teridentifikasi oleh para pihak yang hadir di pertemuan Berastagi dan Pontianak dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Ancaman Terhadap Orangutan Indonesia

No	Ancaman	Tingkat Ancaman	Dampak Utama	Kemungkinan Pengelolaan
1	Tekanan populasi penduduk	Sedang	Degradasi sumberdaya, kepunahan spesies khususnya akibat perburuan, peningkatan erosi, gangguan siklus hidrologi	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah migrasi ke Taman Nasional Membatasi/ mengatur pemanfaatan sumberdaya, Membuat insentif untuk pindah keluar Mengurangi perambahan
2	Perubahan <i>Landuse</i> – tata guna lahan	Tinggi	Degradasi dan kerusakan sumberdaya, kepunahan spesies, kehilangan fungsi hutan	<ul style="list-style-type: none"> Melarang perubahan lahan (<i>landuse</i>) yang jadi habitat orangutan Penyediaan alternatif mata pencaharian Mendorong ada perda yang mengakomodir ttg habitat orangutan, dengan membangun kawasan konservasi daerah di APL
3	Kebakaran hutan	Tinggi	Degradasi habitat Kematian orangutan	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan konservasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran <i>Rescue</i> dan translokasi
4	Pertambangan	Sedang	Perubahan dan degradasi habitat	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong adanya aturan yang melarang pertambangan pada kawasan yang menjadi habitat orangutan
5	Penegakan aturan yang lemah	sedang	Penebangan hutan dan perburuan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Ada forum yang akan memonitor kegiatan penegakan aturan Ada aturan dan kebijakan pengelolaan orangutan di luar kawasan konservasi
6	Penebangan hutan	Tinggi	Habitat orangutan berkurang, perubahan vegetasi dan penurunan populasi	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman penebangan di areal yang ada orangutan Pengembangan kawasan konservasi daerah
7	Perburuan/ Perdagangan <i>illegal</i>	Tinggi	Kepunahan spesies, perubahan struktur komunitas	<ul style="list-style-type: none"> Melarang perburuan Patroli pengamanan Pendidikan Penyediaan alternatif ekonomi Penegakan aturan

E. Penyelamatan (*rescue*), rehabilitasi, dan reintroduksi

Peluasan kawasan pertanian, perkebunan, industri, pertambangan dan pemukiman tentu saja berdampak pada semakin sempitnya tempat hidup dan ruang gerak orangutan di habitat alaminya. Tidak mengherankan jika

tingkat kejadian konflik antara manusia dan orangutan di berbagai lokasi di Sumatera dan Kalimantan meningkat drastis selama beberapa tahun terakhir ini.

Sampai 2007 terdapat sekitar 1.200 orangutan Kalimantan di tiga (3) pusat rehabilitasi orangutan di Kalimantan, yaitu Wanariset-Samboja di Kalimantan Timur, serta Nyaru Menteng (Palangka Raya) dan Pasir Panjang (Pangkalan Bun) di Kalimantan Tengah. Selain di Kalimantan, terdapat sekitar 16 orangutan Sumatera di pusat karantina Batu Mbelin, Sibolangit, Sumatera Utara. Besarnya jumlah orangutan yang berada di pusat-pusat rehabilitasi menunjukkan bahwa ancaman perburuan, perdagangan, konversi lahan, kepemilikan *illegal* orangutan masih sangat besar.

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengurangi konflik adalah dengan merelokasi orangutan ke lokasi baru yang diperkirakan lebih aman dan mempunyai daya dukung yang cukup untuk menjamin keberlangsungan populasi orangutan di tempat itu. Relokasi memerlukan biaya tidak sedikit, yang meliputi tindakan penyelamatan di lokasi konflik (*rescue*), proses rehabilitasi, pencarian lokasi baru, dan pemindahan orangutan ke tempat baru (reintroduksi). Untuk itu, diperlukan kerjasama dari semua pihak yang terlibat untuk mengatasi persoalan konflik. Hal terpenting yang perlu dipahami dan disadari adalah, bahwa konflik dapat dihindari dan dicegah dengan pengelolaan kawasan yang memperhatikan unsur ekologi dan tingkah laku orangutan (Kotak 1). Melalui pengelolaan yang tepat, seperti sistem zonasi yang dibatasi penghalang alami, pembuatan koridor, dan pengayaan habitat, para pihak dapat menjadikan relokasi sebagai pilihan terakhir dalam upaya mereka meredakan konflik dengan orangutan. Untuk mengetahui lebih lanjut tindakan yang perlu diambil oleh para pengelola kawasan (pemerintah daerah, HPH, HTI, perkebunan dan pertambangan) di lokasi konflik, *Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Penanggulangan Konflik* dapat dijadikan acuan.

Kotak 1
BMP

Pengembangan *Better Management Practices* (BMP) atau Petunjuk Teknis Penanganan Konflik Manusia-Orangutan di dalam dan sekitar perkebunan kelapa sawit (2007) didorong oleh pemikiran bahwa berbagai praktik yang menyeimbangkan faktor produksi dengan lingkungan dan sosial di dalam dan sekitar perusahaan akan meningkatkan produktivitas perkebunan secara keseluruhan. Beberapa pendekatan dalam BMP yang dapat diterapkan suatu perkebunan, antara lain:

- HCVF: alat untuk mengidentifikasi *High Conservation Values* pada tingkat bentang alam dan perkebunan untuk meningkatkan pengelolaan kebun
 1. HCV 1 : Kawasan hutan yang mengandung konsentrasi nilai-nilai keragaman hayati yang penting secara global, regional maupun nasional (misal daerah endemik, spesies terancam punah)
 2. HCV 2 : Kawasan hutan yang mengandung hamparan hutan luas yang penting secara nasional, regional dan global terkandung di dalamnya atau mengandung unit yang dikelola (UD), dimana populasi dari spesies yang ada hidup dalam pola yang alami atau dalam distribusi yang alami dan berlimpah.
 3. HCV 3 : Kawasan hutan berada dalam atau mengandung ekosistem yang langka atau terancam
 4. HCV 4 : Kawasan hutan yang memberikan jasa atau kegunaan mendasar secara alamiah dalam keadaan kritis
 5. HCV 5 : Kawasan Hutan yang sangat diperlukan sebagai sumber kebutuhan dasar penduduk lokal
 6. HCV 6 : Daerah hutan yang sangat diperlukan oleh komunitas lokal untuk mempertahankan identitas budaya mereka
- Resolusi konflik manusia dengan hidupan liar : pedoman untuk penetapan dan atau pemeliharaan koridor bagi hidupan liar, kawasan bantaran sungai atau hutan
- Restorasi dan konservasi habitat: mengkonservasi kawasan hutan yang berada di dalam kawasan perkebunan untuk meningkatkan keanekaragaman hayatinya. Hal ini termasuk kawasan yang diklasifikasikan sebagai tidak sesuai bagi perkebunan kelapa sawit
- Resolusi dan pencegahan konflik tanah/ulayat: mengidentifikasi potensi resolusi bila terjadi konflik dengan masyarakat setempat
- Tanpa bakar (*zero burning*): teknik penyiapan lahan yang tidak menimbulkan kebakaran

Sebagian besar orangutan yang berada pada pusat rehabilitasi berasal dari proses penyitaan yang dilakukan Balai Konservasi dan Sumberdaya Alam (BKSDA) terhadap masyarakat yang memelihara dan memperjualbelikan satwa itu. Selain itu, dengan meningkatnya konflik yang terjadi semakin banyak pula orangutan yang diselamatkan dari lokasi konflik dan ditempatkan di pusat rehabilitasi. Sebagian kecil lainnya berasal dari masyarakat yang menyerahkan secara sukarela orangutan peliharaannya, setelah mereka mengetahui bahwa kepemilikan satwa liar yang dilindungi itu merupakan tindakan melanggar hukum, selain berpotensi menjadi sumber penyakit bagi keluarga.

IUCN Guidelines for the Placement of Confiscated Animals merekomendasikan tiga pilihan yang dapat diterapkan terhadap orangutan hasil penyitaan atau hasil proses *rescue* dari daerah konflik. Pilihan terbaik adalah dengan mengembalikan orangutan ke habitat alaminya atau reintroduksi, setelah satwa tersebut melewati proses rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik dan tingkah lakunya. Rehabilitasi menjadi proses

yang sangat penting mengingat banyak orangutan hasil penyitaan dan penyelamatan menderita berbagai penyakit menular, seperti hepatitis B dan tuberkulosis (TBC), yang dapat berdampak buruk bagi populasi liar lainnya. Akan tetapi, program rehabilitasi memerlukan biaya yang besar dan bukan menjadi pilihan yang berkelanjutan untuk jangka panjang. Oleh karenanya, program penyadartahuan dan penegakan hukum tetap merupakan upaya preventif terpenting dalam konservasi orangutan.

Pilihan lain yang direkomendasikan oleh *IUCN* adalah melakukan *euthanasia* terhadap orangutan hasil penyelamatan dan penyitaan yang diketahui menderita penyakit TBC akut yang tidak dapat disembuhkan. Rekomendasi itu dikeluarkan oleh *The Veterinary Working Group* dan *the Rehabilitation and Reintroduction Group* pada *Orangutan Conservation and Reintroduction Workshop* tahun 2002 sebagai pilihan untuk mengurangi risiko penularan penyakit kepada populasi orangutan yang sehat dan manusia yang terlibat di dalam program rehabilitasi. Tentu saja, *euthanasia* harus dilakukan dengan mempertimbangkan rasa sakit, penderitaan dan menurunnya kualitas hidup orangutan, serta setelah semua alternatif lain diputuskan tidak dapat dijalankan.

F. Konservasi eksitu

Jumlah orangutan yang berada di kebun binatang atau taman margasatwa dan taman safari di Indonesia pada tahun 2006 sebanyak 203 individu (Laporan Seksi Lembaga Konservasi, 2007). Standar operasional minimum untuk kebun binatang (*zoo minimum operating standards*) di Indonesia telah ada dan menjadi keharusan bagi anggota PKBSI (Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia) untuk ditaati. Tetapi proses monitoring dan evaluasi terhadap kebun binatang belum berjalan baik menyebabkan banyak anak orangutan yang dilahirkan di sana tidak mencapai usia dewasa.

Kebun binatang dan taman safari di Indonesia diharapkan bisa lebih berperan dalam konservasi orangutan, dengan lebih meningkatkan program pendidikan dan penyadartahuan masyarakat dan tidak berorientasi bisnis semata. Selain itu, praktik pemeliharaan (*husbandry*) di seluruh kebun binatang yang ada di Indonesia perlu ditingkatkan dan dievaluasi secara teratur oleh PKBSI dengan melibatkan para ahli untuk menjamin kualitas pelaporan dan transparansi.

Laporan dari *International Studbook of Orangutan in World Zoos* (2002) mencatat 379 orangutan borneo, 298 orangutan sumatera, 174 orangutan hibrid, dan 18 orangutan yang tidak diketahui atau tidak jelas asal-usulnya dipelihara di berbagai kebun binatang seluruh dunia. Perlu dicatat bahwa jumlah itu hanya berasal dari kebun binatang yang memenuhi permintaan data dari pemegang *studbook* yang ditunjuk, sehingga ada sejumlah orangutan lainnya tidak tercatat dan diketahui pasti jumlahnya. Selain membuat kebijakan yang mengatur pengelolaan populasi orangutan di kebun binatang dan taman safari, pemerintah juga sebaiknya mengembangkan sistem pendataan nasional yang diperlukan untuk memantau keberadaan populasi orangutan di berbagai kebun binatang dan taman safari di Indonesia.

G. Penelitian

Banyak temuan dan perkembangan baru yang berkaitan dengan studi kedokteran hewan, genetika, penelitian perilaku dan ekologi primata telah dihasilkan para peneliti Indonesia dan mancanegara yang bermanfaat bagi upaya konservasi orangutan. Penelitian orangutan di Indonesia merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang sangat produktif dan telah berlangsung sejak tahun 1960an. Stasiun penelitian Ketambe di Taman Nasional Gunung Leuser- Aceh Tenggara dan Camp Leakey di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah merupakan situs penelitian lapangan terlama dan masih berjalan sampai saat ini di Indonesia. Keduanya telah menjadi medan penggalian berbagai informasi ilmiah tentang sejarah hidup orangutan sejak 1971. Sebagian besar pengetahuan kita tentang kedua jenis orangutan berasal dari kedua stasiun penelitian tersebut.

Pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan orangutan tidak saja penting bagi upaya konservasi satwa itu, melainkan juga menjadi acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penelitian di kawasan rawa Suaq Balimbing, Aceh Selatan, misalnya, mengungkap tingkah laku menggunakan "alat" dalam kehidupan sehari-hari orangutan. Sebelumnya, kepandaian menggunakan alat untuk memperoleh makanan hanya dilaporkan dari populasi simpanse di Afrika. Penemuan tersebut penting dalam upaya kita memahami evolusi budaya, termasuk budaya manusia sendiri.

Pengalaman mendirikan dan mengelola stasiun penelitian seperti Ketambe dan Camp Leakey sebaiknya dapat diteruskan dengan membangun sarana serupa di lokasi-lokasi lain di Sumatera dan Kalimantan. Untuk itu diperlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak mengingat investasi yang harus ditanamkan tidak sedikit.

Kotak 2
Penelitian Jangka Panjang harus Berkelanjutan

Pusat penelitian Ketambe di Taman Nasional Gn. Leuser, Aceh Tenggara, Sumatera adalah satu-satunya tempat penelitian orangutan Sumatera yang terus melakukan penelitian orangutan liar yang ada di sana sejak tahun 1971 (terputus karena kondisi keamanan 2002-awal 2003) sampai saat ini.

Penelitian di Ketambe telah dilakukan sejak tahun 1970-an melalui program kerjasama berbagai universitas. Ketambe tidak hanya menjadi pusat penelitian ekologi, tetapi juga telah menjadi area pelatihan konservasi bagi generasi muda Indonesia maupun manca negara lainnya. Hasil dari kerjasama penelitian dan pelatihan konservasi ini telah dibuktikan dengan kontribusi langsung dalam konservasi di Indonesia.

Ketambe juga telah berkontribusi luar biasa dalam membantu kita manusia untuk lebih memahami orangutan dan banyak hasil penelitiannya telah dipublikasi di jurnal-jurnal nasional dan internasional serta membantu dalam proses analisa berbagai lokakarya konservasi orangutan, antarlain PHVA orangutan pada tahun 1993 dan 2004; dan pembuatan rencana aksi orangutan Sumatera di Berastagi pada tahun 2005.

Pentingnya penelitian jangka panjang telah dibuktikan melalui hasil penelitian dari Ketambe. Kita terus mendapatkan data dari individu-individu yang telah diikuti sejak tahun 1971 hingga saat ini. Berdasarkan catatan penelitian tersebut kita akhirnya mengetahui antara lain, bahwa orangutan adalah satu-satunya mamalia darat yang dapat hidup hingga usia lanjut serta mempunyai jarak antar kelahiran yang sangat lama (8-9 tahun; ini paling lama di antara semua mamalia *terrestrial* di dunia). Orangutan dapat hidup melewati usia 50-an tahun. Dalam regenerasi hutan juga sudah dibuktikan fungsinya sebagai salah satu kunci penyebar biji. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melanjutkan penelitian jangka panjang; paling tidak satu siklus kehidupan dari orangutan. Perlu kita pikirkan, jika suatu studi sepanjang ini di hentikan, artinya, kita harus mulai lagi dari awal. Hal ini akan memerlukan waktu 35 tahun lagi sebelum kita sampai kembali ke posisi pengetahuan kita akan orangutan di Ketambe.

Keberadaan penelitian di Ketambe tidak hanya menyumbang dunia ilmu pengetahuan, namun juga menjaga kelestarian hutan primer disana. Pada saat terputusnya penelitian karena kondisi keamanan (2002-2003) kasus *illegal logging* terjadi di area penelitian, begitu pula pembukaan sebagian area di pinggir sungai Alas untuk dijadikan kebun. Awal 2003 setelah dilakukannya operasi *illegal logging* oleh pemerintah dan masyarakat, masyarakat lokal bekerjasama dengan beberapa peneliti lokal, mulai melanjutkan penelitian lagi, selain untuk meneliti efek deforestasi terhadap orangutan, juga untuk membantu menjaga kelestarian hutan beserta isinya, agar kasus *illegal logging* dan pembukaan kebun tidak lagi terjadi. Sejak Maret 2007, pusat penelitian Ketambe telah terbuka kembali untuk peneliti manca negara.

Stasiun penelitian orangutan lain yang masih berjalan sampai saat ini adalah :

- o Mentoko, Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur
- o Cabang Panti, Taman Nasional Gunung Palung , Kalimantan Barat
- o Setia Alam, Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah
- o Tuanan, Areal Mawas (Eks. PLG), Kalimantan Tengah
- o Suaq Balimbing, Taman Nasional Gn. Leuser, Aceh Selatan
- o Bahorok, Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

Selain terus melanjutkan berbagai penelitian di bidang ekologi, perilaku dan genetika, penelitian di bidang medis orangutan juga harus lebih dikembangkan di masa mendatang. Hal itu penting untuk mencegah terjadinya *epidemic* atau *pandemic* yang berasal dari orangutan di Indonesia. Informasi yang dihasilkan juga penting bagi peningkatan pengelolaan orangutan di pusat rehabilitasi dan program konservasi eksitu lainnya.

Sebanyak dan sebaik apapun informasi dan data ilmiah yang dihasilkan oleh para peneliti tidak akan menolong orangutan dari ancaman kepunahan, selama pemerintah, pihak industri, dan masyarakat tidak menyadari pentingnya keberadaan orangutan dan hutan tropis dalam kehidupan manusia. Untuk itu, para peneliti harus mampu menyampaikan hasil temuan mereka secara sederhana dan menciptakan berbagai model pengelolaan yang menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi manusia dan orangutan.

III. STRATEGI DAN RENCANA AKSI NASIONAL KONSERVASI ORANGUTAN INDONESIA 2007-2017

Penyusunan strategi dan rencana aksi konservasi orangutan adalah untuk menjamin kelangsungan hidup jangka panjang dua spesies orangutan (Orangutan Sumatra, *Pongo abelii* dan Orangutan Borneo, *Pongo pygmaeus*). Upaya memaksimalkan perlindungan terhadap populasi yang cukup besar ini diprioritaskan berdasarkan viabilitas jangka panjang, keunikan taksonomik dan ekologis. Pengelolaan habitat menjadi salah satu fokus dan ini bisa dilakukan dengan pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ada dan pengelolaan populasi-populasi orangutan yang berada di luar kawasan konservasi dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan yang terkait.

Pengelolaan konservasi orangutan secara umum dapat dibagi kedalam 5 strategi utama yaitu :

- A. Strategi dan program pengelolaan konservasi orangutan
- B. Strategi dan program aturan dan kebijakan
- C. Strategi dan program pengembangan kemitraan dan kerjasama (*Partnership development and collaborative management*);
- D. Strategi dan program komunikasi, penyadartahuan masyarakat dan pemerintah;
- E. Strategi dan program pendanaan.

A. Strategi dan Program Pengelolaan Konservasi Orangutan

Pengelolaan konservasi orangutan dibagi ke dalam 3 strategi utama, yaitu :

1. Strategi meningkatkan pelaksanaan konservasi insitu sebagai kegiatan utama penyelamatan orangutan di habitat aslinya
2. Strategi mengembangkan konservasi eksitu sebagai bagian dari dukungan untuk konservasi insitu orangutan
3. Strategi meningkatkan penelitian untuk mendukung konservasi orangutan

A.1 Strategi meningkatkan pelaksanaan konservasi insitu sebagai kegiatan utama penyelamatan orangutan di habitat aslinya

Konservasi insitu merupakan kegiatan pelestarian orangutan di habitat aslinya. Strategi bertujuan agar semua pemangku kepentingan bekerjasama memantau pengelolaan konservasi orangutan dan habitatnya. Pemantapan kawasan, pengembangan koridor, realokasi kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) menjadi areal konservasi merupakan beberapa aktivitas yang bisa dilakukan untuk penyelamatan orangutan di habitatnya. Perlindungan habitat menjadi dasar utama bagi pengelolaan konservasi insitu orangutan.

Salah satu penyebab hilangnya habitat orangutan adalah perencanaan tata ruang yang kurang baik. Program konservasi orangutan membutuhkan kawasan hutan yang ada saat ini tetap sebagai kawasan hutan dan tidak dikonversi untuk penggunaan lain. Ini akan sangat membantu mengurangi tekanan kepada orangutan yang populasinya sudah sangat terancam punah (orangutan sumatera) dan terancam punah (orangutan kalimantan). Alokasi hutan sebagai habitat bisa dilakukan pada tingkat tata ruang kabupaten, propinsi maupun di tingkat nasional. Pemangku kepentingan dalam penyusunan tata ruang di tingkat kabupaten dan propinsi seharusnya mengalokasikan ruang untuk habitat orangutan.

Habitat orangutan djumpai di kawasan konservasi, hutan produksi, hutan lindung dan juga di kawasan budidaya non kehutanan. Penelitian menunjukkan bahwa 75% dari orangutan liar djumpai di luar kawasan konservasi, kebanyakan di kawasan hutan produksi yang dikelola oleh HPH/HTI dan atau hutan lindung. Orangutan akan bisa bertahan hidup di areal kerja HPH yang dikelola dengan baik, tetapi tidak begitu banyak yang dapat bertahan pada daerah hutan tanaman. Disamping itu, habitat orangutan juga banyak yang berada pada kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) dimana kawasan ini relatif lebih mudah untuk dikonversi ke penggunaan lain, seperti perkebunan, pemukiman dan lainnya. Oleh karena itu, dunia usaha juga harus dilibatkan dalam upaya pengelolaan konservasi orangutan sehingga dampak akibat pembangunan baik di sektor kehutanan maupun di luar kehutanan terhadap orangutan dapat diminimalisir.

Tabel 6. Program dan rencana aksi meningkatkan pelaksanaan konservasi insitu sebagai kegiatan utama penyelamatan orangutan di habitat aslinya

Deskripsi	Tata Waktu	Pemangku kepentingan	Skala Prioritas
Perlindungan habitat baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan konservasi			
1. Membantu setiap pengelola hutan (unit manajemen usaha kehutanan) dan perkebunan untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana kelola orangutan di areal kerjanya	2008-2010	BPK, LSM, Kebun, Universitas, HPH, HTI, Tambang	2
2. Meningkatkan kapasitas unit pengelola kawasan konservasi (KSA dan KPA) dan hutan lindung dalam melakukan konservasi orangutan	2008-2010	PHKA, LSM, masyarakat, Pemda	3
3. Membantu penyusunan SOP penanganan dan pengamanan orangutan dan habitatnya (termasuk tindakan pertolongan/penyelamatan, mitigasi konflik dan termasuk keterlibatan masyarakat)	2008-2010	PHKA, LSM, masyarakat, HPH, HTI, Kebun, Tambang	1
4. Membangun dan mengelola koridor antar habitat orangutan yang sudah terfragmentasi	2008-2012	PHKA, Universitas, HPH, HTI, Kebun, Tambang, LSM, Masyarakat	1
5. Membentuk kawasan perlindungan baru bagi orangutan di kawasan budidaya non kehutanan dalam bentuk kawasan konservasi daerah	2010-2015	PHKA, Pemda, LSM	2
6. Mendorong habitat prioritas konservasi orangutan masuk ke dalam RTRW Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota	2008-2010	PHKA, BAPPENAS, Pemda, LSM/Ornop, Ditjen Tata Ruang PU.	2
Rehabilitasi habitat orangutan, baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan konservasi			
1. Merehabilitasi dan merestorasi kawasan habitat orangutan yang potensial di dalam dan di luar kawasan konservasi	2008-2015	PHKA, LSM, Universitas Masyarakat, BP DAS	3
2. Mendorong unit pengelola mencari pilihan terbaik bagi perlindungan orangutan dan jika perlu melakukan translokasi orangutan maka ini menjadi tanggungjawab pengelola unit manajemen. Translokasi menjadi pilihan terakhir jika rehabilitasi kawasan habitat orangutan di unit manajemen tidak bisa dilakukan.	2008-2015	PHKA, Industri (Tambang, HPH, HTI, kebun,)	1

Keterangan : 1 : Sangat Tinggi; 2 : Tinggi; 3 : Sedang; 4 :Rendah ; 5 : Sangat Rendah

Pada kondisi dimana aktivitas ekonomi menyebabkan terjadinya pengrusakan habitat dan orangutan tidak bisa pindah atau menyelamatkan diri dari proses pembangunan tersebut maka translokasi menjadi pilihan terakhir. Pilihan ini akan diambil bila pilihan lain untuk mempertahankan orangutan di habitatnya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Untuk menghindari ini terjadi, akan lebih efisien jika survei tentang satwa langka, jarang dan dilindungi dilakukan dengan baik sebelum melakukan pembangunan sehingga aktivitas translokasi tidak perlu dilakukan.

Translokasi merupakan proses pemindahan orangutan liar sehat dari habitatnya yang rusak ke habitatnya yang baru, yang lebih aman dan lebih baik. Habitat baru ini diharapkan akan dapat mendukung hidupnya dalam jangka panjang. Translokasi memerlukan biaya tinggi dan untuk itu dibutuhkan adanya aturan yang menjelaskan persoalan biaya terkait translokasi. Banyaknya konversi habitat (hutan) untuk peruntukan lain menjadi penyebab banyaknya orangutan yang ditangkap oleh masyarakat. Pada banyak kasus, satwa-satwa ini dapat disebut sebagai "pengungsi", karena habitat mereka memang sudah tidak ada lagi. Selain akibat konversi lahan, kebakaran hutan juga menjadi penyebab penting adanya orangutan "pengungsi". Orangutan "pengungsi" harus diselamatkan (*rescued*) ke pusat rehabilitasi serta secepatnya di translokasi ke habitat yang masih baik. Namun hal ini bukan merupakan penyelesaian masalah jangka panjang pada konservasi orangutan. Kedepannya, perlindungan habitat harus menjadi prioritas dalam konservasi orangutan.

Indonesia sudah mempunyai data sebaran orangutan (PHVA, 2004) yang akan terus diperbarui. Data ini menjadi alat bantu dalam mengidentifikasi area kunci (*key areas*) yang saat ini bukan merupakan kawasan konservasi. Area kunci ini bisa diusulkan menjadi kawasan konservasi sehingga dapat menambah dan memperluas kawasan konservasi yang telah ada. Informasi yang ada mencakup habitat dan populasi

orangutan yang berada disekitar kawasan tersebut. Contohnya : penunjukan Taman Nasional Sabangau di Kalimantan Tengah. Pada kawasan ini dijumpai populasi orangutan yang penting namun terancam, yang masih bertahan hidup setelah beberapa tahun terjadi kerusakan habitat di areal tersebut.

Disamping itu, perlu dimunculkan terobosan-terobosan baru atau paling tidak mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang ada, yang berkaitan dengan upaya konservasi satwa liar dilindungi. Misalnya : upaya konservasi keanekaragaman hayati di kawasan hutan produksi karena hutan produksi juga merupakan habitat penting satwa liar dilindungi, termasuk orangutan. Pengelola kawasan harus mempunyai sistem yang baik untuk pengelolaan satwa liar langka, jarang dan terancam punah sehingga keberadaan satwa liar dilindungi bisa tetap lestari. Kegiatan pengelolaan ini merupakan kewajiban para pengelola hutan produksi sesuai peraturan yang berlaku. Hal lain yang bisa dilakukan adalah pembentukan kawasan konservasi daerah pada areal KBNK. Kawasan ini ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Ini dapat menjadi terobosan dalam meningkatkan peran daerah dalam konservasi orangutan.

A.2 Strategi mengembangkan konservasi eksitu sebagai bagian dari dukungan untuk konservasi insitu orangutan

Konservasi eksitu yang dilakukan di kebun binatang, taman safari selain bermanfaat bagi pelestarian orangutan juga harus bisa menjadi sarana pendidikan dan peningkatan kepedulian masyarakat akan perlindungan orangutan di Indonesia. Kebun binatang dan lembaga konservasi lainnya harus dikelola dengan baik dan profesional sehingga dapat berperan maksimal untuk pendidikan konservasi. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan orangutan di kebun binatang, khususnya menyangkut pemeliharaan dan kesehatan satwa.

Apabila terjadi penyelundupan orangutan dari Indonesia ke negara lain, menurut peraturan CITES, orangutan tersebut harus dikembalikan ke Indonesia sebagai negara asalnya, dan biaya repatriasi (pengembalian orangutan) menjadi tanggungan negara Indonesia. Ini terasa agak memberatkan negara pemilik orangutan yang diselundupkan, karena harus juga menanggung biaya untuk rehabilitasi hingga pelepasliaran. Oleh karena itu perlu ada kerjasama internasional untuk pengembalian orangutan ke negara asalnya, termasuk kerjasama dalam hal penegakan hukum untuk perdagangan ilegal satwa liar, termasuk orangutan. Misalnya melalui mekanisme ASEAN WEN (*Wildlife Enforcement Network*). Sementara itu, pengembalian orangutan ke habitatnya harus memenuhi persyaratan yang disusun oleh IUCN. Pengembalian orangutan ke habitat asli memerlukan kehati-hatian sehingga tidak terjadi pencemaran genetik, kesehatan dan perilaku. Proses pelepasliaran juga memerlukan pengelolaan habitat dan bahkan adanya restorasi habitat.

Rehabilitasi berarti menyiapkan/mendidik individu (dalam hal ini orangutan) untuk bisa hidup mandiri di lingkungan sosialnya yang "normal" (diantara sesama jenisnya dan di habitat alaminya). Salah satu masalah yang dihadapi kegiatan rehabilitasi orangutan adalah kesulitan mencari lokasi/area untuk pelepasliaran bagi orangutan yang sudah direhabilitasi. Disamping itu, pusat rehabilitasi juga menjumpai berbagai kesulitan lain, seperti : (i) kesulitan untuk memperoleh izin menggunakan kawasan hutan yang cocok untuk pelepasliaran; (ii) kesulitan memperoleh jaminan keselamatan/keamanan orangutan yang dilepasliarkan serta (iii) kesulitan mendapatkan fasilitas (areal/kawasan) yang berfungsi sebagai kawasan khusus untuk mendukung kehidupan orangutan.

Tabel 7. Program dan rencana aksi mengembangkan konservasi eksitu sebagai bagian dari dukungan untuk konservasi insitu orangutan

Deskripsi	Tata Waktu	Pemangku Kepentingan	Skala Prioritas
Kapasitas dan kapabilitas taman safari, kebun binatang dan pusat rehabilitasi dalam konservasi orangutan			
1. Menyusun <i>stud book</i> orangutan di kebun binatang dan taman safari yang ada di Indonesia dan Luar negeri	2008-2010	PHKA, LSM, PKBSI, DitKesWan, Pusat Karantina Hewan	2
2. Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan orangutan di kebun binatang untuk memenuhi standart PKBSI dan aturan terkait lainnya.	2008-2015	PHKA, LSM, PKBSI	2

Deskripsi	Tata Waktu	Pemangku Kepentingan	Skala Prioritas
3. Meningkatkan pengawasan implementasi peraturan pengelolaan orangutan di eksitu oleh tim pengawas dari PHKA	2008-2017	PHKA, LSM, PKBSI	2
4. Mewajibkan semua pusat rehabilitasi, kebun binatang dan taman safari melakukan pelaporan ke PHKA setiap tiga bulan tentang status terakhir orangutan di lembaganya	2008-2017	PHKA, LSM, PKBSI	3
Peran kebun binatang dan taman safari sebagai bagian pendidikan konservasi orangutan			
1. Meningkatkan interaksi kebun binatang dan taman safari dengan sekolah dengan memberikan kemudahan untuk pendidikan konservasi orangutan	2008-2017	PHKA, PKBSI, Sekolah	2
2. Mewajibkan kebun binatang dan taman safari berperan dalam melakukan kegiatan pendidikan konservasi orangutan dan sarana pendukungnya.	2008-2012	PHKA, LSM, PKBSI	2
Pengembalian orangutan ke habitat alam			
1. Melakukan pelepasliaran orangutan ke habitat alami berdasarkan data genetik, sehingga dapat dijamin keaslian dan tidak terjadi pencemaran genetik	2008-2015	PHKA, LSM, Universitas	2
2. Menyusun panduan/ <i>guideline</i> reintroduksi dan pelepasliaran orangutan ke habitat aslinya termasuk penilaian kelayakan habitat	2008	PHKA, LSM, Universitas	3
3. Mencari dan menentukan adanya satu kawasan yang kompak dan aman untuk lokasi pelepasliaran orangutan di setiap wilayah habitat orangutan Sumatera dan Kalimantan sehingga 2015 tidak ada lagi pusat rehabilitasi orangutan di Sumatera dan Kalimantan	2008-2015	PHKA, LSM, Universitas, Swasta, Masyarakat Adat/Lokal	2
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pasca <i>released</i> (pelepasliaran) dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	2008-2017	PHKA, NGO, Pusat Reintroduksi, Universitas, Lembaga Penelitian	3

Keterangan : 1 : Sangat Tinggi; 2 : Tinggi; 3 : Sedang; 4 : Rendah ; 5 : Sangat Rendah

A.3 Strategi meningkatkan penelitian untuk mendukung konservasi orangutan

Penelitian menjadi strategi penting dalam mendukung konservasi orangutan. Penelitian akan memberikan informasi kepada pengelola bagaimana harus melakukan pengelolaan konservasi orangutan disesuaikan dengan tingkat ancaman dan permasalahan pada orangutan dan habitatnya. Habitat yang semakin sedikit dan timbulnya berbagai penyakit merupakan salah satu ancaman bagi orangutan. Disamping itu, juga dibutuhkan adanya penelitian yang memadai tentang apakah orangutan dapat bertahan hidup pada hutan-hutan yang sudah rusak (*degraded forest areas*). Selama ini, hampir semua penelitian orangutan dilakukan di hutan primer atau hutan yang gangguannya relatif kecil.

Penelitian di hutan-hutan yang rusak perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana orangutan bisa dapat bertahan hidup pada kondisi habitat yang kurang layak dan tidak punah. Penelitian yang dilakukan harus terkait dengan perkebunan dan areal perusahaan hutan. Salah satu contoh penelitian di kawasan yang terganggu adalah penelitian orangutan liar di Pusat Penelitian Orangutan Tuanan sejak Agustus 2003. Areal penelitian ini terletak di area Mawas, Kapuas, Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilakukan melalui kerjasama antar beberapa universitas (dalam dan luar negeri) dan LSM lokal. Lokasi penelitian ini merupakan bekas areal PLG dan bekas HPH. Pada sisi lain, keberadaan penelitian di suatu kawasan ternyata dapat membantu melindungi kawasan tersebut baik secara langsung maupun tidak dari berbagai ancaman. Keberadaan peneliti dan aktivitasnya paling tidak dapat terus memonitor langsung kondisi kawasan serta ekologi satwa yang ada di kawasan tersebut.

Penelitian medis tentang orangutan juga perlu dikembangkan untuk memastikan upaya konservasi orangutan tidak sia-sia karena adanya penyakit epidemik atau pandemik. Penelitian ini sangat diperlukan bagi program konservasi eksitu. Penemuan *Simian retrovirus* yang potensial berbahaya pada sebagian besar monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) di kawasan wisata di Bali, harus menjadi perhatian banyak pihak. Sejauh ini, memang hanya satu orang yang terinfeksi dan tanpa mengalami sakit yang serius, akan tetapi potensi untuk terjadinya mutasi pada virus ini tidak boleh disepelekan (*underestimate*), seperti halnya kasus munculnya virus HIV dari virus SIV (*Simian Immunology Syndrome Virus*). Penularan penyakit dari orangutan ke manusia atau sebaliknya (*zoonosis*), sangat mudah terjadi. Ini disebabkan karena adanya kesamaan genetik orangutan dan manusia yang mencapai 97%. Salah satu contoh lain adalah penularan virus ebola di antara

manusia, simpanse dan gorilla di beberapa Negara di Afrika. Virus ebola ini bisa sampai memusnahkan populasi jenis tersebut.

Selain penelitian jangka panjang, survei dan monitoring juga harus dilakukan untuk mengetahui keberadaan orangutan dan kondisi habitatnya. Penelitian juga bisa menyajikan informasi tentang ancaman terhadap orangutan serta permasalahan lainnya yang berkaitan dengan kelestarian orangutan. Melalui kegiatan survei dan monitoring, berbagai program dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan dalam kegiatan konservasi orangutan.

Intensitas dan kontinuitas penelitian akan dapat mendukung aksi penyelamatan menjadi langkah yang lebih efisien. Tetapi penelitian tidak hanya kepada populasi dan genetika saja, melainkan juga habitat. Disamping itu, program pengembangan pusat penelitian sebagai pusat informasi ilmiah tentang orangutan Indonesia juga harus dilakukan. Pusat penelitian juga akan menjadi pusat informasi dan memberi pertimbangan utama bagi program reintroduksi dan pelepasliaran orangutan kembali ke habitat alami.

Tabel 8. Program dan rencana aksi meningkatkan penelitian untuk mendukung konservasi orangutan

Deskripsi	Tata Waktu	Pemangku Kepentingan	Skala Prioritas
Sistem informasi orangutan Indonesia			
1. Pengembangan sistem pangkalan data (<i>database system</i>) tentang genetika, pakan, penyakit, perburuan dan perdagangan orangutan Indonesia; data dasar ini akan menjadi acuan pemantauan orangutan Indonesia, baik di insitu, eksitu, relokasi, pelepasliaran, dan sebagainya	2008 - 2010	PHKA, Universitas	2
2. Meningkatkan keterlibatan laboratorium acuan orangutan yang sudah ada baik dalam penelitian maupun kebutuhan medis dan forensik.	2008-2017	Universitas, laboratorium, LSM, (Genetika dan Virus : PSSP IPB, Fisiologi : FKH IPB; Parasit : FKH UGM, Malaria : Lab Eijkman dan NAMRU Nutrisi Pakan : LIPI)	3
Penelitian orangutan			
1. Melakukan penelitian ekologi dan perilaku, distribusi, genetik, pakan, reproduksi, orangutan di dalam dan diluar kawasan konservasi (KPA/KSA); diperlukan untuk meminimalisasi konflik orangutan-manusia dan mendorong pengelolaan orangutan yang efektif di dalam hutan produksi dan perkebunan	2008-2017	PHKA, Universitas, LSM, Swasta	2
2. Melakukan penelitian tentang medis orangutan; sehingga tidak terjadi penularan penyakit antar orangutan, dan juga menjadi acuan bagi pelepasliaran orangutan	2008-2012	PHKA, Universitas, LSM	1
3. Survei dan monitoring populasi dan habitat orangutan di dalam kawasan dan diluar kawasan konservasi	2008-2010	PHKA, Universitas, LSM	1
4. Melanjutkan penelitian jangka panjang yang sudah dilakukan di beberapa stasiun penelitian orangutan yang data dan hasil penelitiannya dikelola dengan baik	2008-2017	PHKA, Universitas, LSM, Swasta	3
Teridentifikasinya kawasan habitat orangutan baik pada kawasan konservasi atau kawasan hutan yang sudah terdegradasi maupun kawasan hutan di luar kawasan konservasi			
1. Melakukan survei dan pemetaan potensi habitat orangutan Indonesia; diperlukan identifikasi dan inventarisasi daerah yang potensial menjadi habitat orang utan, baik secara alami maupun melalui program restorasi habitat, dan juga daya dukung habitat yang akan dijadikan tempat pelepasliaran orangutan	2008-2012	PHKA, Universitas,	1
2. Melakukan survei dan pemetaan potensi koridor, diperlukan untuk mendukung adanya konektivitas antar habitat dan populasi orangutan yang terpisah	2008-2012	PHKA, Universitas, LSM/NGO	2

Keterangan : 1 : Sangat Tinggi; 2 : Tinggi; 3 : Sedang; 4 :Rendah ; 5 : Sangat Rendah

B. Strategi dan Program Aturan dan Kebijakan

Pada bidang aturan dan kebijakan, ada 2 (dua) strategi utama, yaitu :

1. Strategi mengembangkan dan mendorong terciptanya kawasan konservasi daerah berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, tata ruang wilayah, status hukum dan kearifan masyarakat
2. Strategi Meningkatkan implementasi dan menyempurnakan berbagai peraturan perundangan untuk mendukung keberhasilan konservasi orangutan

B.1 Strategi mengembangkan dan mendorong terciptanya kawasan konservasi daerah berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, tata ruang wilayah, status hukum dan kearifan masyarakat

Salah satu undang-undang yang sangat penting dalam perlindungan spesies, termasuk orangutan adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. Selain itu, undang-undang lain yang juga sangat penting terkait dengan perlindungan habitat orangutan adalah UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Habitat orangutan berada di kawasan konservasi, kawasan hutan produksi dan kawasan budidaya non kehutanan. Perlu ada dorongan kebijakan di semua level untuk mendukung pelestarian orangutan di habitat alami. Dorongan kebijakan yang sudah mengadopsi kekhasan daerah antara lain adalah mewujudkan adanya kawasan konservasi daerah pada kawasan KBNK. Pola ini diharapkan sudah memenuhi unsur kekhasan, kearifan lokal, faktor ekologi dalam penataan ruang mikro dan peran serta dukungan pemerintah daerah atau masyarakat. Kebijakan ini juga menjadi bukti peran dan dukungan pemerintah daerah dalam konservasi orangutan. Kawasan konservasi juga perlu kepastian hukum, untuk itu perlu ada penguatan secara legal. Kepastian ini akan mempermudah implementasi pengelolaan habitat dan spesies sesuai dengan rencana aksi, khususnya penegakan aturan konservasi.

Tabel 9. Program dan rencana aksi mengembangkan dan mendorong terciptanya kawasan konservasi daerah berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, tata ruang wilayah, status hukum dan kearifan masyarakat

Deskripsi	Tata Waktu	Pemangku Kepentingan	Skala Prioritas
Peraturan daerah untuk kawasan perlindungan orangutan di daerah yang merupakan habitat orangutan			
1. Memfasilitasi terbentuknya kawasan konservasi daerah sebagai kawasan perlindungan orangutan	2008-2010	PHKA, Pemda, LSM	2
2. Membuat kebijakan atau Perda untuk perlindungan orangutan pada kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)	2008-2017	PHKA, Pemda, LSM	2
3. Melakukan evaluasi dan rekonstruksi tataruang mikro pada kawasan yang diketahui menjadi habitat satwa langka dan dilindungi khususnya orangutan	2008-2010	PHKA, Pemda, LSM	1
Status kawasan hutan yang menjadi habitat orangutan			
1. Melakukan tata batas dan pengukuhan kawasan konservasi, hutan lindung, KBNK yang memiliki habitat orangutan	2008-2015	PHKA, Baplan, Pemda, BPN	2
2. Meningkatkan upaya penegakan hukum bagi perburuan, perdagangan dan perusakan habitat orangutan	2008-2017	PHKA, Pemda, LSM dan Polisi, jaksa, hakim,	1
3. Mengembangkan sistem pembiayaan jasa lingkungan (air, karbon, REDD) dari habitat orangutan sehingga habitat terlindungi	2008-2017	PHKA, Pemda, LSM	4
4. Memfasilitasi investor untuk membangun hutan restorasi bagi kelestarian orangutan	2008-2012	PHKA, Pemda, LSM, Donor	2

Keterangan : 1 : Sangat Tinggi; 2 : Tinggi; 3 : Sedang; 4 : Rendah ; 5 : Sangat Rendah

B.2 Strategi meningkatkan implementasi dan menyempurnakan berbagai peraturan perundangan untuk mendukung keberhasilan konservasi orangutan

Keberhasilan konservasi orangutan sangat ditentukan oleh dukungan kebijakan dan peraturan formal. Kebijakan dan aturan tentang konservasi sangat dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan pembangunan ekonomi menimbulkan tekanan terhadap sumberdaya hutan dan pada gilirannya akan menyebabkan munculnya tekanan terhadap keberlangsungan hidup orangutan. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam aspek kebijakan untuk mendukung konservasi orangutan adalah : (1) Bagaimana membangun dan mengembangkan jaringan untuk penegakan peraturan perundangan; dan (2) Bagaimana mendorong dilakukannya pembaharuan aturan tentang konservasi orangutan

Ada tiga (3) faktor potensial yang menyebabkan konservasi orangutan berpotensi gagal, dan ketiga faktor itu harus dikendalikan dengan perbaikan peraturan perundangan. Tiga (3) faktor tersebut adalah :

- 1). Konversi hutan alam menjadi peruntukan lain yang tidak transparan dan tidak memperhitungkan keberadaan spesies dilindungi. Ini telah menyebabkan perubahan hutan-hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman dan pemanfaatan lainnya. Diperlukan keterbukaan, akuntabilitas dari pembuat kebijakan dalam memberikan izin konsesi baik untuk sawit maupun hutan tanaman. Perlu dilakukan program peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan monitoring dan investigasi, sehingga permasalahan pemberian konsesi yang dapat mengancam kelestarian orangutan dapat dihindari.
- 2). Penebangan hutan tidak terkendali. Kegiatan pembalakan liar menjadi sumber kerusakan utama habitat orangutan yang masih terus berlangsung. Untuk memberantas kejahatan di bidang kehutanan ini, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pemberantasan penebangan liar, menandatangani MoU dengan berbagai negara lain, dan sebagainya.
- 3). Perdagangan ilegal orangutan. Penegakan hukum terhadap perburuan, pemeliharaan dan perdagangan orangutan telah meningkat sejak tahun 1990an. Masih diperlukan adanya perbaikan dalam perundangan untuk meningkatkan penegakan hukum guna menghentikan perburuan dan perdagangan orangutan. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparat penegak hukum tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan orangutan harus dilakukan untuk meningkatkan kegiatan penegakan hukum. Kasus perburuan dan perdagangan orangutan harus lebih banyak yang dibawa ke pengadilan dan dilakukan proses penegakan hukum secara efektif dengan memberikan hukuman yang tinggi.

Tabel 10. Program dan rencana aksi meningkatkan implementasi dan menyempurnakan berbagai peraturan perundangan untuk mendukung keberhasilan konservasi orangutan

Deskripsi	Tata Waktu	Pemangku Kepentingan	Skala Prioritas
Revisi perundang-undangan yang ada.			
1. Menyiapkan masukan untuk revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	2008-2017	PHKA, LSM	3
Peningkatan implementasi peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan orangutan			
1. Peningkatan kapasitas lembaga terkait dalam penanganan orangutan hasil penegakan hukum	2008	PHKA, LSM, Donor	3
Peraturan perlindungan orangutan diluar habitatnya			
1. Diseminasi aturan larangan memelihara, memperdagangkan orang utan	2008-2013	PHKA, LSM	3
2. Memfasilitasi perubahan lampiran PP 7 Tahun 1999 terkait dengan status taksonomi orangutan	2008	PHKA, LSM	2
3. Menyederhanakan prosedur perizinan pengangkutan spesimen biologis orangutan untuk kegiatan penelitian dan pemeriksaan medis	2008	PHKA, LSM, Universitas, LIPI	2
4. Mensosialisasikan SOP penyitaan orangutan	2008	PHKA	2

Deskripsi	Tata Waktu	Pemangku Kepentingan	Skala Prioritas
5. Menyusun standar pengelolaan orangutan yang ada di lembaga konservasi	2008-2010	PHKA, LSM, LIPI Universitas	3
6. Memfasilitasi proses penyusunan kebijakan penanganan satwa sitaan (termasuk keputusan <i>euthanasia</i> sebagai opsi terakhir)	2008-2009	PHKA, LSM, Universitas	2
7. Memfasilitasi pembuatan aturan pengelolaan stasiun penelitian orangutan di dalam dan di luar kawasan konservasi	2008-2010	PHKA, LSM	3
Peraturan perlindungan orangutan didalam habitatnya			
1. Mereview dan merevisi Keputusan Menhut No 280/Kpts-II/1995 tentang pedoman reintroduksi orangutan	2008	PHKA, LSM	2
Sistem evaluasi bagi unit pengelola yang mempunyai habitat orangutan			
1. Membangun sistem pemantauan dan evaluasi untuk penilaian kinerja unit pengelola yang memasukkan pengelolaan orangutan pada indikator kinerja	2008-2010	PHKA, LSM, dunia usaha	3
2. Memantau dan mengevaluasi implementasi komitmen dan konvensi Internasional yang telah diratifikasi (GRASP, CBD, CITES)	2008-2012	PHKA, LSM	3

Keterangan : 1 : Sangat Tinggi; 2 : Tinggi; 3 : Sedang; 4 : Rendah ; 5 : Sangat Rendah

C. Strategi dan Program Kemitraan dan Kerjasama dalam Mendukung Konservasi Orangutan Indonesia

Dalam kemitraan dan kerjasama untuk mendukung konservasi orangutan Indonesia, ada 3 strategi utama, yaitu :

1. Strategi meningkatkan dan memperluas kemitraan antara pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan orangutan Indonesia
2. Strategi mengembangkan kemitraan lewat pemberdayaan masyarakat
3. Strategi menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas dan kapabilitas pihak pelaksana konservasi orangutan di Indonesia

C.1 Strategi meningkatkan dan memperluas kemitraan antara pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan konservasi orangutan Indonesia

Pengelolaan orangutan dengan pemangku kepentingan yang cukup beragam membutuhkan pola kelola yang adaptif. Di lain pihak, juga dibutuhkan adanya kearifan tradisional dalam pengelolaan orangutan. Masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar habitat orangutan sebenarnya mempunyai aturan adat dan kearifan lokal dalam melindungi hutan dan bisa mendukung upaya perlindungan orangutan menjadi lebih efektif dan efisien. Peningkatan peran aturan adat, peraturan desa sangat diperlukan untuk mendukung perlindungan habitat orangutan.

Pengelolaan kolaboratif menjadi pilihan dalam pengelolaan kemitraan dalam jangka panjang. Ini menjadi pilihan pengelolaan yang paling tepat dengan kondisi permasalahan dan variasi pemangku kepentingan dalam konservasi orangutan yang cukup tinggi. Untuk itu diperlukan dorongan untuk membangun manajemen kolaboratif dalam konservasi orangutan Indonesia. Manajemen kolaborasi juga sudah diadopsi dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang kolaborasi di kawasan konservasi walau dalam implementasi masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Pengelolaan kolaborasi dengan multi pihak diyakini akan bisa menggerakkan upaya perlindungan orangutan menjadi lebih efektif.

Tabel 11. Program dan rencana aksi meningkatkan dan memperluas kemitraan antara pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan konservasi orangutan Indonesia

Deskripsi	Tata Waktu	Pemangku Kepentingan	Skala Prioritas
Forum Orangutan Indonesia			
1. Memperkuat forum komunikasi antar pakar orangutan menjadi wadah <i>multistakeholder</i> yang disebut Forum Orangutan Indonesia; sebagai pusat informasi penelitian dan kegiatan konservasi orangutan Indonesia.	2008-2017	PHKA, LSM, Pemda, Lembaga Adat, swasta, Masyarakat	1
Revitalisasi aturan adat dalam konservasi orangutan			
1. Penyusunan peraturan desa/aturan adat untuk pelestarian orangutan Indonesia	2008-2012	PHKA, LSM, Pemda, Lembaga Adat, Masyarakat	2
2. Memperkuat fungsi kelembagaan adat dan lokal untuk pelestarian orangutan	2008-2017	PHKA, LSM, Pemda, Lembaga Adat, Masyarakat lokal	3
Pengelolaan kolaboratif dalam konservasi orangutan Indonesia			
1. Evaluasi implementasi Permenhut No.19/2004	2008	LSM dan PHKA	1
2. Membangun sistem manajemen kolaboratif pelestarian orangutan	2009-2010	PHKA, LSM, Pemda, swasta, masyarakat	2
3. Mengembangkan manajemen kolaboratif di setiap wilayah dan disahkan	2010-2015	PHKA, LSM, Pemda, swasta, masyarakat	3

Keterangan : 1 : Sangat Tinggi; 2 : Tinggi; 3 : Sedang; 4 :Rendah ; 5 : Sangat Rendah

C.2 Strategi mengembangkan kemitraan lewat pemberdayaan masyarakat

Upaya konservasi orangutan bermitra dengan masyarakat harus dilakukan dalam bingkai pengelolaan SDA berbasis masyarakat. Pola yang dikembangkan harus bermanfaat baik bagi pemangku kepentingan maupun bagi orangutan. Peran serta masyarakat sangat penting untuk menjamin tercapainya tujuan konservasi. Dalam pelaksanaannya, bisa dijumpai keterlibatan masyarakat dalam perlindungan/pengamanan habitat orangutan serta untuk melawan perburuan dan perdagangan liar orangutan. Contoh : Unit Monitoring dan Perlindungan Orangutan (*Orangutan Protection and Monitoring Unit*) di Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Jambi.

Tabel 12. Program dan rencana aksi mengembangkan kemitraan lewat pemberdayaan masyarakat

Deskripsi	Tata Waktu	Pemangku Kepentingan	Skala Prioritas
Alternatif mata pencaharian yang mendukung pelestarian orangutan			
1. Mengkaji dan mengembangkan alternatif ekonomi yang ramah lingkungan dan mendukung konservasi orangutan (misalnya: ekowisata)	2010-2012	PHKA, Pemda, LSM, swasta	3
2. Melatih penduduk lokal menjadi guide/pemandu wisatawan dan terlibat dalam unit pengamanan dan pemantauan orangutan (<i>orangutan protection monitoring unit</i>)	2008-2015	PHKA, LSM, swasta, Pemda	3
3. Membangun model-model desa konservasi yang menjadikan orangutan sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi dan budaya, melalui penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan bersama masyarakat, pengembangan ekowisata bersama masyarakat, pengembangan teknologi pertanian yang ramah lingkungan	2008-2012	PHKA, Pemda, LSM, masyarakat, Universitas	2
4. Mengalokasikan program pemberdayaan masyarakat dari pemda, perusahaan ke kawasan disekitar habitat orangutan	2009-2015	PHKA, Pemda, LSM, swasta	3
5. Mengembangkan sistem pendanaan pedesaan (<i>micro finance</i> dan <i>credit union</i>) yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar habitat orangutan	2010-2017	PHKA, Pemda, LSM, swasta	4
6. Membantu akses informasi pasar bagi petani sekitar habitat orangutan	2010-2017	PHKA, Pemda, LSM, swasta	4

Keterangan : 1 : Sangat Tinggi; 2 : Tinggi; 3 : Sedang; 4 :Rendah ; 5 : Sangat Rendah

C.3 Strategi menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas dan kapabilitas pihak pelaksana konservasi orangutan di Indonesia

Komitmen, kapasitas dan kapabilitas dalam melaksanakan pelestarian orangutan sangat variatif. Diperlukan adanya upaya untuk penyamaan dan peningkatan komitmen, kapasitas dan kapabilitas. Variasi yang lebar dari pemangku kepentingan mendorong pilihan pendidikan yang dilakukan adalah pelatihan. Pelatihan sebaiknya berlangsung terus menerus.

Tabel 13. Program dan rencana aksi menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas dan kapabilitas pihak pelaksana konservasi orangutan di Indonesia

Deskripsi	Tata Waktu	Pemangku Kepentingan	Skala Prioritas
Pelatihan berkelanjutan untuk konservasi orangutan dan habitatnya			
<ul style="list-style-type: none">Melakukan pelatihan teknis konservasi dan investigasi kepada warga masyarakat, pengelola hutan (HPH/HTI), pengelola kawasan konservasi, LSM yang ada di sekitar kawasan habitat orangutan	2008-2017	PHKA, LSM, Pemda, Masyarakat, Universitas	2
<ul style="list-style-type: none">Melakukan pelatihan kelola koridor kepada unit manajemen khususnya perkebunan	2008-2017	PHKA, BPK, LSM, Pemda, HPH, Perkebunan	2
<ul style="list-style-type: none">Melakukan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang konservasi orangutan	2008-2017	PHKA, LSM, Pemda, Polisi, Jaksa, Hakim	1

Keterangan : 1 : Sangat Tinggi; 2 : Tinggi; 3 : Sedang; 4 :Rendah ; 5 : Sangat Rendah

D. Strategi dan Program Komunikasi dan Penyadartahuan Masyarakat untuk Konservasi Orangutan

Strategi meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan komitmen mengenai pentingnya upaya konservasi orangutan Indonesia

Peningkatan pendidikan konservasi dan penyadartahuan lingkungan harus dilakukan untuk mencapai perubahan perilaku masyarakat terhadap konservasi, khususnya perlindungan orangutan. Penyadaran masyarakat merupakan kunci pemahaman akan jasa lingkungan yang dapat disediakan hutan. Kesadaran ini akan membuat masyarakat menghentikan dan mengurangi pengrusakan habitat orangutan seperti pembalakan liar dan sekaligus melestarikan orangutan.

Masyarakat harus dapat memahami manfaat keberadaan hutan dan spesies di dalam kehidupan mereka dan membantu melakukan upaya untuk mengurangi hilangnya habitat yang lebih besar akibat pembalakan liar dan/atau perusakan habitat. Namun, masyarakat juga harus dibantu untuk memperoleh akses informasi sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dan kulaitas hidupnya walau mengurangi ketergantungannya pada sumber daya hutan.

Tanpa upaya mengurangi fragmentasi hutan, membangun koridor yang menghubungkan habitat orangutan yang terpisah, mengurangi kehilangan habitat dan menghentikan perburuan, maka kepunahan spesies orangutan akan semakin dekat. Ada beberapa hal yang harus dikembangkan untuk mendukung program ini , antara lain :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyadartahuan masyarakat
2. Mempengaruhi skema lembaga keuangan dalam memberikan kredit agar memperhitungkan prinsip-prinsip konservasi lingkungan.
3. Meningkatkan pendidikan konservasi khususnya orangutan di Indonesia

Kerjasama antar pemangku kepentingan sangat diperlukan. Sinergitas dan konsistensi komitmen dan dukungan untuk konservasi orangutan Indonesia akan menjadikan implementasi rencana kerja lebih efisien. Forum komunikasi antar pemangku kepentingan perlu dioptimalkan sehingga akan menjadi forum yang bekerja untuk semua pemangku kepentingan dan mengurangi terjadinya peluang kesalahpahaman antar pemangku kepentingan konservasi orangutan.

Tabel 14. Program dan rencana aksi meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan komitmen mengenai pentingnya upaya konservasi orangutan Indonesia

Deskripsi	Tata Waktu	Pemangku Kepentingan	Skala Prioritas
Membangun konstituen dan dukungan untuk konservasi orangutan			
1. Memperbanyak peliputan media untuk konservasi orangutan.	2008-2010	PHKA, LSM, Media	2
2. Meningkatkan kapasitas media terhadap pemahaman hal-hal yang berhubungan dengan konservasi orangutan melalui pelatihan penulisan isu lingkungan, pemberian informasi konservasi orangutan secara berkala dan kunjungan lapangan (<i>field trip</i>)	2008-2010	PHKA, LSM, Media, Universitas	2
3. Memperluas sebaran materi komunikasi konservasi orangutan melalui media cetak dan media elektronik	2008-2017	PHKA, LSM, Media	3
4. Memanfaatkan forum keagamaan, lembaga adat, lembaga profesi dan institusi lokal untuk menyajikan dan menjelaskan pentingnya konservasi orangutan dan habitatnya	2008-2017	PHKA, LSM, organisasi sosial, lembaga agama	3
Skema perkreditan/perbankan yang mengadopsi prinsip-prinsip konservasi orangutan			
1. Melakukan penyadartahuan pentingnya konservasi habitat orangutan kepada lembaga keuangan	2008-2017	PHKA, LSM, lembaga keuangan	4
2. Melakukan pelatihan tentang konservasi kepada lembaga keuangan, tentang nilai ekonomi dan dampak akibat pengrusakan lingkungan	2008-2017	PHKA, LSM, Pemangku kepentingan	4
Pendidikan konservasi orangutan di Indonesia			
1. Memperluas jangkauan pendidikan konservasi orangutan kepada masyarakat melalui jaringan pendidikan lingkungan (JPL), pertemuan rutin dengan masyarakat, pendekatan kepada kelompok-kelompok keagamaan dan aliran kepercayaan serta, kelompok-kelompok sosial remaja, perempuan'.	2008-2017	PHKA, LSM, Pemda, Lembaga Keagamaan, organisasi sosial	3
2. Memasukkan pendidikan konservasi orangutan kedalam muatan lokal kurikulum di SD, SMP	2008-2017	PHKA, LSM, Pemda	4
Meningkatkan dan mempertahankan dukungan pemangku kepentingan untuk konservasi orangutan			
1. Memberikan penghargaan kepada individu, masyarakat dan organisasi yang berkontribusi nyata mendukung konservasi orangutan	2008-2017	PHKA, Pemda	3

Keterangan : 1 : Sangat Tinggi; 2 : Tinggi; 3 : Sedang; 4 :Rendah ; 5 : Sangat Rendah

E. Pendanaan untuk Mendukung Konservasi Orangutan

Strategi meningkatkan dan mempertegas peran pemerintah, pemda, lsm serta mencari dukungan lembaga dalam dan luar negeri untuk penyediaan dana bagi konservasi orangutan Indonesia

Konservasi orangutan seharusnya menjadi tanggungjawab semua pemangku kepentingan. Pemerintah berperan sebagai pemangku kepentingan utama dan regulator. Pemerintah membutuhkan peran serta semua pemangku kepentingan untuk mendukung upaya konservasi orangutan. Pemerintah daerah bisa mendukung kegiatan ini dengan mengalokasikan dana rutin dari APBD. Para pemangku kepentingan juga harus saling mendukung dan bekerjasama dalam mencari dan membangun system dana abadi untuk kegiatan konservasi orangutan.

Tabel 15. Program dan rencana aksi meningkatkan dan mempertegas peran pemerintah, pemda, lsm serta mencari dukungan lembaga dalam dan luar negeri untuk penyediaan dana bagi konservasi orangutan Indonesia

Deskripsi	Tata Waktu	Pemangku Kepentingan	Skala Prioritas
Peran pemda dalam konservasi orangutan di setiap wilayah dengan menyediakan dana konservasi di dalam APBD			
1. Pemda memasukkan upaya konservasi orangutan dalam rencana strategis daerah dan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)	2008-2017	PHKA, LSM, Pemda	2
Komitmen pendanaan orangutan			
1. Membangun dana abadi untuk konservasi orangutan	2009-2017	PHKA, LSM	3
2. Mencari dana pengelolaan dari pembayaran jasa lingkungan untuk perlindungan habitat orangutan	2008-2017	PHKA, LSM, Swasta	2
3. Mencari dukungan pendanaan dari swasta antara lain melalui CSR	2008-2017	PHKA, LSM, Swasta	2
4. Mencari dukungan dari lembaga internasional seperti GRASP	2008-2017	PHKA, LSM, Donor	2

Keterangan : 1 : Sangat Rendah; 2 : Rendah; 3 : Sedang; 4 : Tinggi; 5 : Sangat Tinggi

IV. MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI NASIONAL KONSERVASI ORANGUTAN INDONESIA 2007-2017

Pelaksanaan implementasi dari strategi dan rencana aksi ini perlu dipantau dan dievaluasi. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan implementasi strategi dan rencana aksi konservasi orangutan. Beberapa diantaranya adalah :

1. Monitoring/pemantauan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan
2. Evaluasi dilakukan setiap tahun lewat pertemuan tahunan yang akan dilakukan
3. Pertemuan tahunan harus menjadi ajang memberikan umpan balik kepada pengelola dan revisi rencana kerja

A. Monitoring dan Evaluasi Strategi dan Program Pengelolaan Konservasi Orangutan

Tabel 16. Monitoring dan evaluasi strategi dan program pengelolaan konservasi orangutan

Deskripsi	Indikator Sukses	Tata Waktu
Program dan Rencana Aksi Meningkatkan Pelaksanaan Konservasi Insitu Sebagai Kegiatan Utama Penyelamatan Orangutan di Habitat Aslinya		
Perindungan habitat baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan konservasi		
1. Membantu setiap pengelola hutan (unit manajemen usaha kehutanan) dan perkebunan untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana kelola orangutan di areal kerjanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada minimal 10 HPH, 5 HTI dan 10 perkebunan yang punya rencana kelola orangutan di areal kerjanya. 2. Ada laporan pelaksanaan implementasi rencana kelola dari unit manajemen secara periodik setiap tahun 3. Jumlah populasi orangutan di unit manajemen tidak berkurang 	2008-2010
2. Meningkatkan kapasitas unit pengelola kawasan konservasi (KSA dan KPA) dan hutan lindung dalam melakukan konservasi orangutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua UPT yang ada orangutan mempunyai rencana kelola orangutan 2. Ada laporan pelaksanaan implementasi rencana kelola dari unit manajemen secara periodik setiap tahun 3. Pelatihan monitoring orangutan dan habitatnya 2 kali setahun 	2008-2010
3. Membantu penyusunan SOP penanganan dan pengamanan orangutan dan habitatnya (termasuk tindakan pertolongan/ <i>rescue</i> , mitigasi konflik dan termasuk keterlibatan masyarakat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP penanganan dan pengamanan orangutan dan habitatnya sudah disahkan oleh Departemen Kehutanan 2. Sosialisasi dan distribusi dokumen SOP kepada pemangku kepentingan 	2008-2010
4. Membangun dan mengelola koridor antar habitat orangutan yang sudah terfragmentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 20 koridor antar habitat orangutan yang terfragmentasi 2. Ada rencana pengelolaan dan pemantauan koridor 3. Populasi orangutan di habitat alami di sekitar koridor paling sedikit tetap 	2008-2012
5. Membentuk kawasan perlindungan baru bagi orangutan di kawasan budidaya non kehutanan dalam bentuk kawasan konservasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 5 peraturan daerah yang menetapkan Kawasan Konservasi Daerah di areal KBNK sebagai habitat orangutan 	2010-2015
6. Mendorong habitat prioritas konservasi orangutan masuk ke dalam RTRW Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada indikator habitat dalam penentuan revisi dan penyusunan tata ruang Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional 	2008-2010

Deskripsi	Indikator Sukses	Tata Waktu
Rehabilitasi habitat orangutan, baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan konservasi		
1. Merehabilitasi dan merestorasi kawasan habitat orangutan yang potensial di dalam dan di luar kawasan konservasi	<ol style="list-style-type: none"> Ada 5 kawasan habitat orangutan yang direhabilitasi Ada 1 kawasan restorasi untuk menjadi habitat orangutan 	2008-2015
2. Mendorong unit pengelola mencari pilihan terbaik bagi perlindungan orangutan dan jika perlu melakukan translokasi orangutan maka ini menjadi tanggungjawab pengelola unit manajemen. Translokasi menjadi pilihan terakhir jika rehabilitasi kawasan habitat orangutan di unit manajemen tidak bisa dilakukan.	<ol style="list-style-type: none"> Ada kantong perlindungan orangutan di areal unit manajemen Ada koridor dari kawasan kelola ke kawasan konservasi Tidak ada translokasi orangutan ke habitat lain 	2008-2015
Program dan Rencana Aksi Mengembangkan Konservasi Eksitu sebagai bagian dari Dukungan untuk Konservasi Insitu Orangutan		
Kapasitas dan kapabilitas taman safari, kebun binatang dan pusat rehabilitasi dalam konservasi orangutan		
1. Menyusun <i>stud book</i> orangutan di kebun binatang dan taman safari yang ada di Indonesia dan luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> <i>Stud book</i> orangutan sudah selesai disusun dan setiap 3 bulan diperbaharui <i>Stud book</i> orangutan dibangun di PHKA dengan dukungan dari pemangku kepentingan <i>Stud book</i> ini terbuka untuk publik 	2008-2010
2. Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan orangutan di kebun binatang untuk memenuhi standart PKBSI dan aturan terkait lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> Ada pelatihan pengelolaan orangutan di kebun binatang minimal sekali setahun Tersedianya informasi pengelolaan orangutan di kebun binatang yang memadai Evaluasi kinerja kebun binatang dalam pengelolaan orangutan setiap tahun. 	2008-2015
3. Meningkatkan pengawasan implementasi peraturan pengelolaan orangutan di eksitu oleh tim pengawas dari PHKA.	<ol style="list-style-type: none"> PHKA membentuk tim pengawas untuk implementasi peraturan pengelolaan orangutan di eksitu Ada pemeriksaan berkala tentang implementasi aturan pengelolaan orangutan oleh tim pengawas setiap tahun Terdokumentasikannya hasil pemantauan implementasi aturan 	2008-2017
4. Mewajibkan semua pusat rehabilitasi, kebun binatang dan taman safari melakukan pelaporan ke PHKA setiap tiga bulan tentang status terakhir orangutan di lembaganya	<ol style="list-style-type: none"> Ada laporan setiap 3 (tiga) bulan ke PHKA. Melakukan presentasi laporan perkembangan orangutan setiap tahun 	2008-2017
Peran kebun binatang dan taman safari sebagai bagian pendidikan konservasi orangutan		
1. Meningkatkan interaksi kebun binatang dan taman safari dengan sekolah dengan memberikan kemudahan untuk pendidikan konservasi orangutan	<ol style="list-style-type: none"> Ada MoU kerjasama antara kebun binatang, taman safari dengan sekolah Jumlah kunjungan anak sekolah meningkat 50% 	2008-2017
2. Mewajibkan kebun binatang dan taman safari berperan dalam melakukan kegiatan pendidikan konservasi orangutan dan sarana pendukungnya.	<ol style="list-style-type: none"> Ada informasi tentang konservasi orangutan yang memadai dan bersifat edukasi Ada paket pendidikan konservasi orangutan Ada kunjungan berkala dari sekolah ke kebun binatang dan taman safari 	2008-2012
Pengembalian orangutan ke habitat alam		
1. Melakukan pelepasliaran orangutan ke habitat alami berdasarkan data genetik, sehingga dapat dijamin keaslian dan tidak terjadi pencemaran genetik	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah orangutan yang berhasil dilepasliarkan Ada data genetik dari orangutan yang dilepasliarkan 	2008-2015
2. Menyusun panduan/ <i>guideline</i> reintroduksi dan pelepasliaran orangutan ke habitat aslinya termasuk	<ol style="list-style-type: none"> Tersusunan Pedoman (SOP) pelepasliaran 	2008

Deskripsi	Indikator Sukses	Tata Waktu
penilaian kelayakan habitat	orangutan 2. Ada sosialisasi dan pelatihan implementasi SOP	
3. Mencari dan menentukan adanya satu kawasan yang kompak dan aman untuk lokasi pelepasliaran orangutan di setiap wilayah habitat orangutan Sumatera dan Kalimantan sehingga 2015 tidak ada lagi pusat rehabilitasi orangutan di Sumatera dan Kalimantan	1. Diperoleh adanya minimal 3 kawasan yang aman dan kompak sebagai areal pelepasliaran 2. Ditetapkan dan difungsikannya lokasi pelepasliaran orangutan di Sumatera dan Kalimantan 3. Sosialisasi program di sekitar lokasi pelepasliaran di Sumatera dan Kalimantan 4. Semua pusat rehabilitasi berhenti beroperasi setelah tahun 2015	2008-2015
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pasca <i>released</i> (pelepasliaran) dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	1. Tersusunnya program monitoring orangutan yang dilepasliarkan. 2. Laporan monitoring secara berkala. 3. Evaluasi tahunan hasil monitoring.	2008-2017
Program dan Rencana Aksi Meningkatkan Penelitian untuk Mendukung Konservasi Orangutan		
Sistem informasi orangutan Indonesia		
1. Pengembangan Sistem Pangkalan Data (<i>database system</i>) tentang genetika, pakan, penyakit, perburuan dan perdagangan orangutan Indonesia; data dasar ini akan menjadi acuan pemantauan orangutan Indonesia, baik di in-situ, eksitu, relokasi, pelepasliaran, dan lokasi lainnya	1. Pangkalan data selesai disusun dan setiap 3 bulan diperbaharui 2. Pangkalan data dibangun di PHKA dengan bantuan pemangku kepentingan 3. Pangkalan Data orangutan menjadi dokumen publik	2008 - 2010
2. Meningkatkan keterlibatan laboratorium acuan orangutan yang sudah ada baik dalam penelitian maupun kebutuhan medis dan forensik.	1. Ada MoU antara Departemen Kehutanan dengan laboratorium acuan. 2. Jumlah peneliti yang terlibat di laboratorium meningkat 50 % 3. Tersusunnya data base dan sistem jaringan antar laboratorium.	2008-2017
Penelitian Orangutan		
1. Melakukan penelitian ekologi dan perilaku, distribusi, genetik, pakan, reproduksi, orangutan di dalam dan diluar kawasan konservasi (KPA/KSA); diperlukan untuk meminimalisasi konflik orangutan-manusia dan mendorong pengelolaan orangutan yang efektif di dalam hutan produksi dan perkebunan	1. Tersedianya laporan hasil penelitian. 2. Semua laporan penelitian terdokumentasi di PHKA 3. Laporan dapat diakses oleh publik.	2008-2017
2. Melakukan penelitian tentang medis orangutan; sehingga tidak terjadi penularan penyakit antar orangutan, dan juga menjadi acuan bagi pelepasliaran orangutan	1. Tersedianya laporan hasil penelitian. 2. Semua laporan penelitian terdokumentasi di PHKA 3. Laporan dapat diakses oleh publik.	2008-2012
3. Survei dan monitoring populasi dan habitat orangutan di dalam kawasan dan diluar kawasan konservasi	1. Tersedianya laporan hasil penelitian. 2. Semua laporan penelitian terdokumentasi di PHKA 3. Laporan dapat diakses oleh publik. 4. Tersedianya informasi sebaran dan besaran populasi serta habitat potensial orangutan	2008 2010
4. Melanjutkan penelitian jangka panjang yang sudah dilakukan di beberapa stasiun penelitian orangutan yang data dan hasil penelitiannya dikelola dengan baik	1. Tersedianya laporan hasil penelitian di stasiun penelitian dan di PHKA 2. Laporan dapat diakses oleh publik. 3. Ada evaluasi hasil penelitian setiap tahun.	2008-2017
Teridentifikasinya kawasan habitat orangutan baik pada kawasan konservasi atau kawasan hutan yang sudah terdegradasi maupun kawasan hutan di luar kawasan konservasi		

Deskripsi	Indikator Sukses	Tata Waktu
1. Melakukan survei dan pemetaan potensi habitat orangutan Indonesia; diperlukan identifikasi dan inventarisasi daerah yang potensial menjadi habitat orangutan, baik secara alami maupun melalui program restorasi habitat, dan juga daya dukung habitat yang akan dijadikan tempat pelepasliaran orangutan	1. Tersedianya informasi potensial habitat orangutan 2. Tersedia laporan dan peta hasil survei dan pemetaan potensi habitat orangutan Indonesia di PHKA 3. Informasi dapat diakses oleh publik	2008-2012
2. Melakukan survei dan pemetaan potensi koridor, diperlukan untuk mendukung adanya konektivitas antar habitat dan populasi orangutan yang terpisah	1. Tersedianya informasi kawasan yang memiliki potensi sebagai koridor. 2. Tersedianya laporan dan peta tentang potensi koridor di PHKA	2008-2012

B. Monitoring dan Evaluasi Strategi dan Program Aturan dan Kebijakan

Tabel 17. Monitoring dan evaluasi strategi dan program aturan dan kebijakan

Deskripsi	Indikator Sukses	Tata Waktu
Program dan Rencana Aksi Mengembangkan dan Mendorong Terciptanya Kawasan Perlindungan Orangutan		
Peraturan daerah untuk kawasan perlindungan orangutan di daerah yang merupakan habitat orangutan		
1. Memfasilitasi terbentuknya kawasan konservasi daerah sebagai kawasan perlindungan orangutan	1. Lokakarya penentuan dan sosialisasi lokasi yang akan dijadikan kawasan konservasi daerah. 2. Adanya rekomendasi lokasi dan kebijakan untuk mendukung kawasan konservasi daerah untuk perlindungan orangutan	2008-2010
2. Membuat kebijakan atau Perda untuk perlindungan orangutan pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)	1. Ada 5 peraturan daerah yang menetapkan Kawasan Konservasi Daerah di areal KBNK sebagai habitat orangutan	2008-2017
3. Melakukan evaluasi dan rekonstruksi tataruang mikro pada kawasan yang diketahui menjadi habitat satwa langka dan dilindungi khususnya orangutan	1. Adanya revisi tata ruang mikro yang mengakomodasi kebutuhan habitat satwa langka termasuk orangutan.	2008-2010
Status kawasan hutan yang menjadi habitat orangutan		
1. Melakukan tata batas dan pengukuhan kawasan konservasi, hutan lindung, KBNK yang memiliki habitat orangutan	1. Ada Laporan pelaksanaan tata batas. 2. Ada keputusan penetapan kawasan	2008-2015
2. Meningkatkan upaya penegakan hukum bagi perburuan, perdagangan dan perusakan habitat orangutan	1. Jumlah kasus perburuan, perdagangan dan perusakan habitat orangutan yang diproses secara hukum sampai tuntas.	2008-2017
3. Mengembangkan sistem pembiayaan jasa lingkungan (air, karbon, REDD) dari habitat orangutan sehingga habitat terlindungi	1. Tersusunnya konsep pembiayaan jasa lingkungan untuk mendukung konservasi orangutan. 2. Dimasukkannya sistem pembiayaan jasa lingkungan menjadi bagian pengelolaan konservasi orangutan di unit pelaksana teknis. 3. Adanya MoU antara UPT dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan jasa lingkungan di habitat orangutan	2008-2017
4. Memfasilitasi investor untuk membangun hutan restorasi bagi kelestarian orangutan	1. Ada 5 investor yang berkomitmen untuk membangun hutan restorasi untuk mendukung kelestarian orangutan	2008-2012

Deskripsi	Indikator Sukses	Tata Waktu
Program dan Rencana Aksi untuk Menyempurnakan Berbagai Peraturan Perundang-undangan untuk Mendukung Keberhasilan Konservasi Orangutan		
Revisi perundang-undangan yang ada.		
1. Menyiapkan masukan untuk revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1. Usulan revisi UU No. 5 Tahun 1990	2008-2017
Peningkatan implementasi peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan orangutan		
1. Peningkatan kapasitas lembaga terkait dalam penanganan orangutan hasil penegakan hukum	1. Pelatihan penegakan hukum dan setiap pelatihan minimal 30 orang peserta 2. Tersedianya manual pelatihan 3. Tersedianya manual pelaksanaan penegakan hukum 4. Tersedianya kompilasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan spesies.	2008
Peraturan perlindungan orangutan diluar habitatnya		
1. Diseminasi aturan larangan memelihara, memperdagangkan orangutan	1. Diseminasi peraturan melalui seminar, radio, tv, surat kabar 2. Setiap seminar minimal 30 orang peserta 3. Tersedianya lembar informasi larangan memelihara dan memperdagangkan orangutan	2008-2013
2. Memfasilitasi perubahan lampiran PP 7 tahun 1999 terkait dengan status taxonomi orangutan	1. Lokakarya usulan perubahan lampiran PP No. 7 Tahun 1999. 2. Tersedianya konsep usulan perubahan lampiran PP No.7 Tahun 1999.	2008
3. Menyederhanakan prosedur perizinan pengangkutan spesimen biologis orangutan untuk kegiatan penelitian dan pemeriksaan medis	1. Tersedianya SOP perizinan pengangkutan spesimen biologis.	2008
4. Mensosialisasikan SOP penyitaan orangutan	1. Sosialisasi SOP penyitaan orangutan melalui seminar, radio, tv, surat kabar 2. Setiap seminar minimal 30 orang peserta 3. Tersedianya lembar informasi SOP penyitaan orangutan	2008
5. Menyusun standar pengelolaan orangutan yang ada di lembaga konservasi	1. Tersusunnya standar pengelolaan orangutan di lembaga konservasi	2008-2010
6. Memfasilitasi proses penyusunan kebijakan penanganan satwa sitaan (termasuk keputusan <i>euthanasia</i> sebagai opsi terakhir)	1. Lokakarya penyusunan kebijakan penanganan satwa sitaan 2. Tersedianya SOP penanganan satwa sitaan	2008-2009
7. Memfasilitasi pembuatan aturan pengelolaan stasiun penelitian orangutan di dalam dan di luar kawasan konservasi	1. Lokakarya penyusunan peraturan pengelolaan stasiun penelitian orangutan 2. Tersedianya SOP pengelolaan stasiun penelitian orangutan	2008-2010
Peraturan perlindungan orangutan didalam habitatnya		
1. <i>Me-review</i> dan merevisi SK Menhut No 280/Kpts-II/1995 tentang pedoman reintroduksi orangutan	1. Revisi SK Menhut No. No 280/Kpts-II/1995 tentang pedoman reintroduksi orangutan	2008
Sistem evaluasi bagi unit pengelola yang mempunyai habitat orangutan		
1. Membangun sistem pemantauan dan evaluasi untuk penilaian kinerja unit pengelola yang memasukkan pengelolaan orangutan pada indikator kinerja	1. Tersedianya sistem pemantauan internal dalam setiap unit manajemen sebagai implementasi kriteria kinerja unit manajemen pada aspek ekologi.	2008-2010

Deskripsi	Indikator Sukses	Tata Waktu
	2. Adanya laporan implementasi SOP yang dilakukan periodik	
2. Memantau dan mengevaluasi implementasi komitmen dan konvensi Internasional yang telah diratifikasi (GRASP, CBD, CITES)	1. Laporan hasil evaluasi implementasi komitmen dan konvensi internasional.	2008-2012

C. Monitoring dan Evaluasi Strategi dan Program Kemitraan dan Kerjasama dalam Mendukung Konservasi Orangutan Indonesia

Tabel 18. Monitoring dan evaluasi strategi dan program kemitraan dan kerjasama dalam mendukung konservasi orangutan Indonesia

Deskripsi	Indikator Sukses	Tata Waktu
Program dan Rencana Aksi Meningkatkan dan Memperluas Kemitraan antara Pemerintah, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat untuk Berperan Aktif dalam Kegiatan Orangutan Indonesia		
Forum orangutan Indonesia		
1. Memperkuat forum komunikasi antar pakar orangutan menjadi wadah <i>multistakeholder</i> yang disebut Forum Orangutan Indonesia; sebagai pusat informasi penelitian dan kegiatan konservasi orangutan Indonesia.	1. Lokakarya tentang pembentukan forum <i>multistakeholder</i> orangutan Indonesia. 2. Adanya forum <i>multistakeholder</i> 3. Adanya pertemuan tahunan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi konservasi orangutan 4. Ada jaringan komunikasi dan distribusi informasi	2008-2017
Revitalisasi aturan adat dalam konservasi orangutan		
1. Penyusunan peraturan desa/aturan adat untuk pelestarian orangutan Indonesia	1. Lokakarya desa menyusun peraturan desa untuk pelestarian orangutan 2. Adanya 10 peraturan desa untuk pelestarian orangutan.	2008-2012
2. Memperkuat fungsi kelembagaan adat dan lokal untuk pelestarian orangutan	1. Lokakarya desa menyusun aturan adat untuk pelestarian orangutan 2. Adanya aturan adat tentang pelestarian orangutan	2008-2017
Pengelolaan Kolaboratif dalam konservasi orangutan Indonesia		
1. Evaluasi Implementasi Permenhut 19/2004	1. Lokakarya evaluasi implementasi Permenhut 19/2004 2. Adanya usulan rekomendasi penyempurnaan permenhut 19/2004	2008
2. Membangun sistem manajemen kolaboratif pelestarian orangutan	1. Tersedianya mekanisme kolaborasi dalam pengelolaan orangutan	2009-2010
3. Mengembangkan manajemen kolaboratif di setiap wilayah dan disahkan	1. Tersedianya mekanisme kolaborasi dalam pengelolaan orangutan 2. Adanya pengesahan manajemen kolaboratif di setiap wilayah	2010-2015
Program dan Rencana Aksi Mengembangkan Kemitraan Lewat Pemberdayaan Masyarakat		
Alternatif mata pencaharian yang mendukung pelestarian orangutan		
1. Mengkaji dan mengembangkan alternatif ekonomi yang ramah lingkungan dan mendukung konservasi orangutan (misalnya : ekowisata)	1. Ada laporan kajian pengembangan ekonomi alternatif di areal sekitar habitat orangutan 2. Seminar hasil penelitian	2010-2012

Deskripsi	Indikator Sukses	Tata Waktu
2. Melatih penduduk lokal menjadi <i>guidel</i> pemandu wisatawan dan terlibat dalam unit pengamanan dan pemantauan orangutan (<i>Orangutan Protection Monitoring Unit</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pelatihan pemandu lokal, pelatihan pengamanan dan pemantauan orangutan 2. Ada asosiasi pemandu lokal 3. Peserta pelatihan 90% dari masyarakat sekitar habitat orangutan 	2008-2015
3. Membangun model-model desa konservasi yang menjadikan orangutan sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi dan budaya, melalui penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan bersama masyarakat, pengembangan ekowisata bersama masyarakat, pengembangan teknologi pertanian yang ramah lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya konsep desa konservasi 2. Terbentuknya 5 desa konservasi di sekitar kawasan habitat orangutan 	2008-2012
4. Mengalokasikan program pemberdayaan masyarakat dari pemda, perusahaan ke kawasan disekitar habitat orangutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pelatihan pemberdayaan masyarakat dari pemda dan atau perusahaan minimal 5 kali 2. Adanya program pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan dan atau pemda di kawasan sekitar habitat orangutan 	2009-2015
5. Mengembangkan sistem pendanaan pedesaan (<i>micro finance</i> dan <i>credit union</i>) yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar habitat orangutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program <i>microfinance</i> di desa sekitar habitat orangutan 2. Adanya keterkaitan dukungan dengan program pemberdayaan masyarakat dari perusahaan (CSR) 	2010-2017
6. Membantu akses informasi pasar bagi petani sekitar habitat orangutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya akses pasar kepada masyarakat sekitar habitat orangutan 	2010-2017
Program dan Rencana Aksi Menciptakan dan Memperkuat Komitmen, Kapasitas dan Kapabilitas Pihak Pelaksana Konservasi Orangutan di Indonesia		
Pelatihan berkelanjutan untuk konservasi orangutan dan habitatnya		
1. Melakukan pelatihan teknis konservasi dan investigasi kepada warga masyarakat, pengelola hutan (HPH/HTI), pengelola kawasan konservasi, LSM yang ada di sekitar kawasan habitat orangutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pelatihan teknis pengelolaan konservasi orangutan di 10 HPH dan 5 HTI serta 10 perkebunan 2. Tersedianya panduan teknis pengelolaan orangutan untuk unit manajemen 3. Tersedianya panduan investigasi 	2008-2017
2. Melakukan pelatihan kelola koridor kepada unit manajemen khususnya perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya panduan pengelolaan koridor konservasi orangutan 2. Adanya pelatihan teknis pengelolaan koridor konservasi orangutan kepada 10 unit manajemen perkebunan 	2008-2017
3. Melakukan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang konservasi orangutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya model pelatihan penegakan hukum 2. Pelatihan penegakan hukum perlindungan orangutan 3. Terbentuknya forum penegakan hukum. 4. Tersedianya laporan pelaksanaan pelatihan penegakan hukum. 	2008-2017

D. Monitoring dan Evaluasi Strategi dan Program Komunikasi dan Penyadartahuan Masyarakat untuk Konservasi Orangutan

Tabel 19. Monitoring dan evaluasi strategi dan program komunikasi dan penyadartahuan masyarakat untuk konservasi orangutan

Deskripsi	Indikator Sukses	Tata waktu
Program dan Rencana Aksi Meningkatkan Kesadartahuan Para Pemangku Kepentingan Mengenai Pentingnya Upaya Konservasi Orangutan Indonesia		
Membangun konstituen dan dukungan untuk konservasi orangutan		
1. Memperbanyak peliputan media untuk konservasi orangutan.	1. Jumlah pemberitaan konservasi orangutan di media massa baik lokal maupun nasional meningkat	2008-2010
2. Meningkatkan kapasitas media terhadap pemahaman hal-hal yang berhubungan dengan konservasi orangutan melalui pelatihan penulisan isu lingkungan, pemberian informasi konservasi orangutan secara berkala dan kunjungan lapangan (<i>field trip</i>)	1. Tersedianya modul pelatihan untuk media massa mengenai konservasi orangutan 2. Pelatihan untuk media massa mengenai konservasi orangutan. 3. Adanya kunjungan media massa ke lokasi konservasi orangutan. 4. Informasi berkala tentang konservasi orangutan ke media massa.	2008-2010
3. Memperluas sebaran materi komunikasi konservasi orangutan melalui media cetak dan media elektronik	1. Distribusi informasi konservasi orangutan di media cetak dan elektronik. 2. Membuat berbagai kegiatan (<i>event</i>) sebagai media distribusi informasi konservasi orangutan.	2008-2017
4. Memanfaatkan forum keagamaan, lembaga adat, lembaga profesi dan institusi lokal untuk menyajikan dan menjelaskan pentingnya konservasi orangutan dan habitatnya	1. Melakukan pertemuan yang membahas konservasi orangutan di forum keagamaan, lembaga adat, profesi dan institusi lokal. 2. Memasukan pesan konservasi orangutan dalam forum keagamaan, lembaga adat, profesi dan institusi lokal.	2008-2017
Skema perkreditan/perbankan yang mengadopsi prinsip-prinsip konservasi orangutan		
1. Melakukan penyadartahuan pentingnya konservasi habitat orangutan kepada lembaga keuangan	1. Tersedianya materi tentang konservasi orangutan untuk diinformasikan kepada lembaga keuangan 2. Lokakarya peran lembaga keuangan dalam mendukung konservasi orangutan. 3. Adanya panduan pemberian kredit ramah lingkungan (<i>green credit</i>)	2008-2017
2. Melakukan pelatihan tentang konservasi kepada lembaga keuangan, tentang nilai ekonomi dan dampak akibat pengrusakan lingkungan	1. Pelatihan tentang valuasi jasa lingkungan dan manfaat jasa konservasi kepada lembaga keuangan. 2. Laporan hasil pelatihan.	2008-2017
Pendidikan konservasi orangutan di Indonesia		
1. Memperluas jangkauan pendidikan konservasi orangutan kepada masyarakat melalui jaringan pendidikan lingkungan (JPL), pertemuan rutin dengan masyarakat, pendekatan kepada kelompok-kelompok keagamaan dan aliran kepercayaan serta, kelompok-kelompok sosial remaja, perempuan'.	1. Memasukkan isu konservasi orangutan ke dalam jaringan pendidikan lingkungan. 2. Pertemuan berkala tentang konservasi orangutan kepada berbagai kelompok sasaran.	2008-2017

Deskripsi	Indikator Sukses	Tata waktu
Program dan Rencana Aksi Meningkatkan Kesadartahuan Para Pemangku Kepentingan Mengenai Pentingnya Upaya Konservasi Orangutan Indonesia		
2. Memasukkan pendidikan konservasi orangutan kedalam muatan lokal kurikulum di SD, SMP	1. Diterbitkannya buku-buku yang memiliki muatan lokal konservasi orangutan 2. Pelatihan konservasi orangutan kepada para guru SD dan SMP.	2008-2017
Meningkatkan dan mempertahankan dukungan pemangku kepentingan untuk konservasi orangutan		
1. Memberikan penghargaan kepada individu, masyarakat dan organisasi yang berkontribusi nyata mendukung konservasi orangutan	1. Tersusunnya kriteria pemberian penghargaan konservasi orangutan. 2. Adanya pemberian penghargaan konservasi orangutan.	2008-2017

E. Monitoring dan Evaluasi Strategi dan Program Pendanaan untuk Mendukung Konservasi Orangutan

Tabel 20. Monitoring dan evaluasi strategi dan program pendanaan untuk mendukung konservasi orangutan

Deskripsi	Indikator Sukses	Tata Waktu
Program dan Rencana Aksi Meningkatkan dan Mempertegas Peran Pemerintah, Pemda, LSM serta Mencari Dukungan Lembaga Dalam dan Luar Negeri untuk Penyediaan Dana bagi Konservasi Orangutan Indonesia		
Peran Pemda dalam konservasi orangutan di setiap wilayah dengan menyediakan dana konservasi di dalam APBD		
1. Pemda memasukkan upaya konservasi orangutan dalam rencana strategis daerah (Renstra) dan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)	1. Lima (5) kabupaten memasukkan konservasi orangutan dalam rencana strategis daerah dan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)	2008-2017
Komitmen pendanaan orangutan		
1. Membangun dana abadi untuk konservasi orangutan	1. Lokakarya pengembangan dana abadi untuk konservasi orangutan. 2. Tersusunnya konsep pengelolaan dana abadi 3. Terkelolanya dana abadi untuk konservasi orangutan.	2009-2017
2. Mencari dana pengelolaan dari pembayaran jasa lingkungan karena perlindungan habitat orangutan	1. Tersedianya dana yang diperoleh dari pengelolaan jasa lingkungan.	2008-2017
3. Mencari dukungan pendanaan dari swasta antara lain melalui CSR	1. Adanya alokasi dana CSR untuk mendukung konservasi orangutan.	2008-2017
4. Mencari dukungan dari lembaga internasional seperti GRASP	1. Adanya alokasi dana dari GRASP untuk mendukung konservasi orangutan di Indonesia	2008-2017

DAFTAR PUSTAKA

- Corner, E.H.J. 1978. The Plant Life. In: Kinibalu summit of Borneo (Luping, D.M., wen, C.W., dan Dingley, E.R. eds.), Sabah Soc. Kota Kinibalu p. 112-178
- Delgado, R.A., dan van Schaik, C.P. 2000. The Behavior Ecology and Conservation of the Orangutan (*Pongo pygmaeus*): A Tale of Two Island. *Evol Anthropol* 9: 201-218
- Djojosedharmo, S., dan van Schaik, C.P. 1992. Why are orang utans so rare in the highlands? Altitudinal changes in a Sumatran forest. *Trop. Biodiv.*, 1, 11-22.
- Ellis, S., Singleton, I., Andayani, N., Traylor-Holzer, K., dan Supriatna, J. (eds.).2006. Sumatran Orangutan Conservation Action Plan. Washington, DC and Jakarta, Indonesia: Conservation International
- Final Report: Bornean Orangutan Conservation Action Plan Workshop, 12-14 October 2005, Pontianak, West Kalimantan, Indonesia
- Galdikas, B.M.F. 1982. Orangutan as seed dispersal at Tanjung Putting Reserve Central Borneo. In: The Orangutan: Its Biology and Conservation (Boer, L.D. ed). Junk Pub, Boston, p. 285
- Galdikas, B.M.F. 1984. Adaptasi orangutan di Suaka Tanjung Putting, Kalimantan Tengah. Universitas Indonesia Press. Jakarta
- Groves, C. 2001. Primate Taxonomy. Smithsonian Institution Press, Washington, DC
- Husson, S., Meijaard, E., Singleton, I., van Schaik, C.P., dan Wich, S.A. 2003. The Status of the Orangutan in Indonesia, 2003. Pre-PHVA meeting, Singapore, August 13-15, 2003, Orangutan Foundation-UK, London, UK
- IUCN (World Conservation Union) 2007 *IUCN Red List of Threatened Species* (IUCN, Gland, Switzerland, 2007).
- Mackinnon, J.R. 1974. The ecology and behaviour of wild orang-utans (*Pongo pygmaeus*). *Anim. Behav.* 22: 3-74
- Meijaard, E., Rijksen, H.D., and Kartikasari, S.N. 2001. Di Ambang Kepunahan!: Kondisi Orangutan Liar di Awal Abad ke-21. Tropenbos, Gibbon Foundation.
- Meijaard, E. & Wich, S.A. 2007. Putting orangutan population trends into perspective. *Current Biology*, **17**, R540.
- PPHT-UNMUL 2006. Prosiding Membedah Orangutan. Bedah buku dan lokakarya penyusunan rencana aksi penyelamatan orang-utan dan habitatnya di Kalimantan Timur. Samarinda, 14-15 Juni 2006
- Rijksen, H.D. 1978. A field study on Sumatran orangutans (*Pongo pygmaeus abelii*, Lesson 1827): ecology, behaviour and conservation, Veenman, Wageningen
- Rijksen, H.D., dan Meijaard, E. 1999. Our vanishing relative. The status of wild orangutans at the close of the twentieth century. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands
- Rodman, P.S. 1973. Population composition and captive organization among orang-utan of the Kutai reserve. In: Comparative ecology and behaviour of primates (Michael, R.P., dan Crook, J.H. eds). Academic Press, London
- Russon, A., Wich, S., Ancrenaz, M., Kanamori, T., Knott, C., Kuze, N., Morrogh-Bernard, H., Pratje, P., Ramlee, H., Rodman, P., Sidiyasa, K., Singleton, I., van Schaik, C. (in press). Geographic variation in orangutan diets. In *Orangutans: Geographic Variation in Behavioral Ecology* (eds. S.A. Wich, S.S. Utami Atmoko, T. Mitra Setia, and C.P. van Schaik). Oxford Univ. Press, Oxford
- Singleton, I., Wich, S. A., Husson, S., Stephens, S., Utami-Atmoko, S. S., Leighton, M., Rosen, N., Traylor-Holzer, K., Lacy, R. & Byers, O. (eds). 2004. *Orangutan population and habitat viability assessment: final report*, IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, Apple Valley, MN.
- Suhandi, A.S. 1988. Regenerasi jenis-jenis tumbuhan yang dipencarkan oleh orangutan sumatera (*Pongo pygmaeus abelii*) di hutan tropika Gunung Leuser. Skripsi sarjana Fakultas Biologi Universitas Nasional, Jakarta.
- Utami, S.S., dan van Hooff, J.A.R.A.M. 1997. Meat-eating by adult female sumatran orangutan (*Pongo pygmaeus abelii*). *Am.J.Primatology* 43: 159-165
- Warren, K.S., Verschoor, E.J., Langenhuijzen, S., Heriyanto, Swan, R.A., Vigilant, L., dan Heeney, J.L. 2001. Speciation and intraspecific variation of Bornean orangutans, *Pongo pygmaeus*. *Mol Biol Evol* 18: 472-480
- Wich, S.A., Utami-Atmoko, S.S., Setia, T.M., Rijksen, H.D., Schürmann, C. & van Schaik, C.P. 2004. Life history of wild Sumatran orangutans (*Pongo abelii*). *Journal of Human Evolution* 47: 385-398
- Wich, S.A. (2007). Orangutan Survey report to Fauna and Flora International

- Wich, S.A., Meijaard, E., Marshall, A.J., Husson, S., Ancrenaz, M., Lacy, R.C., van Schaik, C.P., Sugardjito, J., Simorangkir, T., Traylor-Holzer, K., Galdikas, B.M.F., Doughty, M., Supriatna, J., Dennis, R., Gumal, M., dan Singleton, I. The status of the orangutan: an overview of this current distribution. *Oryx*, in prep.
- Yuwono, E.H., Susanto, P., Saleh, C., Andayani, N., Prasetyo, D., dan Utami Atmoko, S.S. 2007. Petunjuk teknis Penanganan Konflik Manusia-Orangutan di Dalam dan Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit. WWF-Indonesia, Jakarta

Daftar Perundangan dan Peraturan

1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
3. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati)
4. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
6. PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
7. PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam
8. PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
9. PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa)
10. PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
11. PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
12. Keppres No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora & Fauna)
13. Keppres No. 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional
14. Kepmenhut No. 460/Kpts-II/1990 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 62/Kpts-II/1998 Tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar
15. Kepmenhut No. 882/Kpts-II/92 Tentang Penetapan Tambahan Beberapa Jenis Satwa Yang Dilindungi Undang-Undang Disamping Jenis-Jenis Satwa Yang Telah Dilindungi
16. Kepmenthut No. 36/Kpts-II/1996 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Selaku Pemegang Kewenangan Pelaksanaan (*Managment Authoriy*) CITES)
17. Kepmenhut No. 617/Kpts-II/1996 tentang Pemasukan Satwa Liar Dari Wilayah Lain Dalam Negara Republik Indonesia Ke Taman Buru dan Kebun Buru
18. Kepmenhut No. 479/Kpts-II/1998 Tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan Dan Satwa Liar
19. Kepmenhut No. 241/Kpts-II/1999 Tentang Pemberian Izin Kepada Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas Selamanik Banjarnegara, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Sebagai Lembaga Konservasi *Ex-situ* Satwa Liar Dalam Bentuk Kebun Binatang
20. Kepmenhut No. 242/Kpts-II/1999 Tentang Pemberian Izin Kepada Taman Safari Indonesia Sebagai Lembaga Konservasi *Ex-situ* Satwa Liar Dalam Bentuk Kebun Binatang
21. Kepmenhut No. 250/Kpts-II/1999 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Bina Wisata Kasang Kulim Pekanbaru Riau Sebagai Lembaga Konservasi *Ex-situ* Satwa Liar Dalam Bentuk Kebun Binatang

